

Pelaksanaan Ujian / Munaqasyah :	
Pembimbing II :	Risma Handayani, S.IP.,M.Si
Hari/Tgl :	Kamis, 13 Juli 2017
Jam :	11.00 S.d Selesai
Lokasi/Tempat :	Ruang Jurusan

Ujian Munaqasyah

ANALISIS PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN TERBANGUN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT PETANI DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUH. RISKY. K

NIM. 60800110048

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Senin 23 Oktober 2017

Penyusun,

Muh. Risky K
60800110048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : Muh. Risky K

NIM : 60800110048

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


IR, RUDI LATIEF, M.Si


RISMA HANDAYANI, S.IP, M.Si

Mengetahui;

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan wilayah dan kota


Prof. Dr. H. ARIFUDDIN., M.Ag
NIP. 1969 1205 199303 1 001


DR. H. MUHAMMAD ANSHAR, S.Pt., M.Si
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” yang disusun oleh **Muh. Risky K, NIM: 60800110048**, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, Senin 23 Oktober 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Fadhil Shurur, ST., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Murshal Manaf, MSP.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Munaqisy III	: Juhanis, S. Sos., MM.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. Rudi Latief, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Risma Handayani, S.IP., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag
NIP. 1969 1205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari banyaknya hambatan dan rintangan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini, namun berkat motivasi, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak sehingga semua hambatan dan rintangan dapat teratasi.

Dan pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Ir. Rudi Latief, M.si., selaku pembimbing Pertama, dan Ibu Risma Handayani, S.IP.,M.Si, selaku pembimbing kedua yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan dorongan semangat serta perhatian sampai tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt.,M.si, selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, seluruh staf Pengajar dan Staf Administrasi fakultas sains dan teknologi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Samata Kabupaten Gowa.
3. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Badan

Pemberdayaan Kabupaten Gowa, Bapak Kepala Kesatuan Bangsa Kabupaten Gowa, Ibu Camat Pallangga, Bapak/Ibu Kelurahan beserta staffnya,” dan seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Pallangga yang telah banyak membantu memberikan sumbangsi pemikiran, serta pengadaan data dan informasi.

4. Khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan baik moril maupun materil serta saudara-saudaraku semuanya yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan selama ini.
5. Sahabat serta rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi jurusan teknik Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya angkatan”2010” yang telah banyak memberikan bantuan pemikiran dan dorongan untuk senantiasa selalu semangat.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Amin.

Upaya untuk mencapai hasil yang maksimal telah dilakukan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan baik materi maupun teknik penyusunannya. Maka dengan rendah hati penulis membuka diri menerima kritikan dan saran maupun masukan guna penyempurnaan.

Akhirnya dengan segala kekurangannya penulis sampaikan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat.....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Batasan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Lahan	13
B. Definisi Perubahan Fungsi Lahan (konversi lahan)	19
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan	21
D. Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non-Pertanian	27
E. Penguasaan Lahan	30
F. Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Petani	33
G. Peraturan Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian.....	38
H. Perspektif Pertanian Dalam Islam.....	40
I. Rekapitulasi PEPRES RI Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan MAMMINASATA	43
J. Rekapitulasi Kebijakan dan Penetapan Terhadap Kedudukan Kecamatan Pallngga, Terkait Sektor Petanian Dalam Rencana	

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Objek Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Populasi dan sampel	56
G. Variabel Penelitian	58
H. Metode Analisis Data	58
I. Definisi Operasional	64
J. Kerangka Pembahasan	70
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	72
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	72
B. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga	74
C. Aspek Sosial Ekonomi Kecamatan Pallangga	92
D. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian	97
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Uraian Kegiatan Tugas Akhir Tahun 2017	52
Tabel 2	Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang Berpengaruh	59
Tabel 3	Keterangan Ranking/Nilai Variabel Positif (Kekuatan dan Peluang) (Awaluddin 2010, 55).....	61
Tabel 4	Keterangan Ranking/Nilai Variabel Negatif (Kekuatan dan Peluang) (Awaluddin 2010, 55)	62
Tabel 5	Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Pallangga	74
Tabel 6	Aspek Penggunaan Lahan di Kecamatan Pallangga	79
Tabel 7	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga Tahun 2010-2015	85
Tabel 8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pallangga Tahun 2010-2015	87
Tabel 9	Jumlah Fasilitas Peribadatan dirinci per Kelurahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	88
Tabel 10	Jumlah Fasilitas Kesehatan dirinci per Kelurahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	89
Tabel 11	Jumlah Fasilitas Pendidikan dirinci per Kelurahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	90
Tabel 12	Penilaian Responden Berdasarkan Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	93
Tabel 13	Penilaian Responden Berdasarkan Mata Pencarian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	94
Tabel 14	Penilaian Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	95

Tabel 15	Produktivitas Pertanian Di Kecamatan Pallangga Tahun 2013-2015..	96
Tabel 16	Penilaian Responden Berdasarkan Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	96
Tabel 17	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	98
Tabel 18	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Mata Pencarian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	100
Tabel 19	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	102
Tabel 20	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016	104
Tabel 21	Perkembangan Penggunaan Lahan di Kecamatan Pallangga Tahun 2011-2016	106
Tabel 22	Analisis Strategi Kebijakan Penggunaan Lahan (SWOT)	108

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pallangga Tahun 2010-2015	86
Grafik 2	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016.....	99

Grafik 3	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Mata Pencaharian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016.....	101
Grafik 4	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016.....	103
Grafik 5	Penilaian Responden Pengaruh Faktor Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Pallangga Tahun 2016.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Faktor Pengaruh Konversi Lahan Pertanian	22
Gambar 2	Peta Lokasi Penelitian	51
Gambar 3	Diagram Penentuan Strategi Prioritas Analisis SWOT (Awaluddin 2010, 56)	63
Gambar 4	Kerangka Pembahasan	71
Gambar 5	Peta Administrasi Kabupaten Gowa	73
Gambar 6	Peta Administrasi Kecamatan Pallangga	75
Gambar 7	Peta Topografi Kecamatan Pallangga	80
Gambar 8	Peta Hidrologi Kecamatan Pallangga.....	81
Gambar 9	Peta Geologi Kecamatan Pallangga	82
Gambar 10	Peta Klimatologi Kecamatan Pallangga.....	83
Gambar 11	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Pallangga 2011 dan 2016.....	84

ABSTRAK

Nama : Muh. Risky. K
NIM : 60800110048
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Perluasan Kabupaten Gowa mengekspansi Kecamatan Pallangga yang merupakan daerah pertanian sehingga terjadi perubahan fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Fenomena yang terjadi adalah alih fungsi lahan (Konversi lahan). Fenomena tersebut akan berdampak pada produktivitas pertanian dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dalam hal ini penurunan tingkat kesejahteraan karena kehilangan tempat mata pencaharian. Tentunya di butuhkan penelitian untuk mengungkap kebenaran hal tersebut .

Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan bagaimana dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga? Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga?

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan didukung data kualitatif dan kuantitatif. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden, cara wawancara mendalam dan pengamatan selama penelitian berjalan. Data sekunder diperoleh dari dokumen, baik dokumen pemerintah desa/kelurahan maupun tokoh dan lembaga yang ada. Adapun Variabel yang digunakan adalah perubahan pemanfaatan lahan pertanian, faktor dan pengaruh alih fungsi lahan. Alat Analisis yang digunakan adalah metode overlay dan SWOT. Faktor yang mempengaruhi adalah harga lahan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan produktivitas pertanian.

Perhitungan statistik menunjukkan bahwa konversi lahan dalam kasus ini berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga petani. Dalam hal ini, sebuah rumahtangga petani akan lebih sejahtera ketika mengkonversikan lahannya menjadi lokasi usaha industri.

Kata Kunci : Konversi Lahan, Sosial Ekonomi Masyarakat dan Perluasan Kota

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Risky K S.Pwk Lahir di Kota Sungguminasa tanggal 10 April tahun 1992, ia merupakan anak ke- 12 dari- 14 bersaudara dari pasangan **Drs. H. Kadir Baharu** dan **HJ. Mariati** yang merupakan Suku Makassar Asli yang tinggal dan menetap di Kota Sungguminasa. Ia menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar di SD. Inpres Pangkabinanga pada tahun 1998 - 2004.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP. Neg. 1 Pallangga pada tahun 2004 - 2007, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Neg. 2 Makassar jurusan Arsitektur pada tahun 2007 - 2010. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur Khusus (SBMPTN) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 6 tahun 10 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan beragam. Ketersediaan potensi yang melimpah tersebut merupakan modal awal dan bekal yang potensial untuk mendukung pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia, Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa termasuk juga pembangunan di bidang pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture). Kabupaten Gowa contohnya sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi lahan pertanian yang memadai dan potensial sudah seharusnya menerapkan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Menurut data statistik Kabupaten Gowa tahun 2013 di kecamatan Pallangga merupakan daerah yang mengalami perubahan lahan pertanian yang sangat signifikan seiring perkembangan, dan penambahan penduduk, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius demi menjaga lahan yang ada di wilayah ini.

Pada data statistik kabupaten Gowa tahun 2010, lahan pertanian kecamatan Pallangga berkurang, yaitu pada tahun 1996 lahan pertanian di kecamatan ini sebesar 11.006 ha dan pada tahun 2010 sebesar 7.933 ha atau berkurang sebesar 14 % (BPS, 2013).

Penguasaan dan penggunaan lahan yang beralih fungsi seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan jumlah penduduk di kecamatan pallangga. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan kompleks akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam, berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius. Implikasi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi (Iqbal, 2007).

Dampak negatif dari alih fungsi lahan, sawah tidak hanya berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian, juga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan kerja serta penurunan pendapatan petani penggarap dan juga buruh tani. Tak dapat diingkari bahwa untuk wilayah tropis maka fungsi sawah pada musim penghujan bukan sekedar lahan yang dipergunakan untuk budidaya padi, tetapi juga merupakan hamparan yang efektif untuk menampung kelebihan air

limpasan. Secara teknis, areal persawahan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari air limpasan tertampung di areal persawahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Isra ayat 84 yang mengisyaratkan bahwa seluruh perubahan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh ulah maupun kegiatan manusia. Yakni sebagai berikut :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Terjemahnya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar, jalannya. termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. (Surah Al-Isra : 17/84,)

Maksud dari ayat tersebut diatas yaitu Islam sangat mendorong produktivitas dan mengembangkannya baik kualitas maupun kuantitas. Islam melarang menyianyikan potensi material maupun SDM. Bahkan islam mengarahkannya agar dapat dimanfaatkan. Sebagai mana diungkapkan Yusuf Qardhawi, bahwa di dalam prinsip ekonomi islam kegiatan produksi menjadi suatu yang unik dan istimewa sebab di dalamnya terdapat faktor itqan (profesionalitas) yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang di berbagai daerah. Lahan yang semakin sempit semakin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Petani

lebih memilih bekerja di sektor informal dari pada bertahan di sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan (Ashari, 2003). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah At- Taubah ayat 105 yang mengisyaratkan bahwa setiap umat islam diperintahkan untuk mampu memiliki etos kerja yang keras, sehingga dapat menjadi umat yang (kuat ekonominya). Yakni sebagai berikut :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Adapun isi kandungan dari Surah At-Taubah Ayat 105 :

1. Setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya).
2. Umat islam yang mampu (kuat ekonominya) lebih unggul dibandingkan dengan umat islam yang kurang mampu.
3. Umat islam yang mampu dan beriman, dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat islam yang lain yang masih lemah dari ancaman kekafiran.
4. Allah SWT. Akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak diakhirat.

Faktor eksternal merupakan dampak transformasi struktur ekonomi dan demografis. Lahan tak berubah tetapi permintaan meningkat akibat pertumbuhan

penduduk. Akibatnya, penggunaan lahan bergeser pada aktivitas nonpertanian yang lebih menguntungkan. Faktor internal yang menyebabkan perubahan lahan adalah kemiskinan. Buruknya kondisi sosial ekonomi memicu petani menjual lahan pertaniannya. Mereka merasa tidak mendapat keuntungan ekonomi dari lahan itu.

Masalah perubahan lahan dapat diatasi bila pemerintah daerah sangat ketat dalam hal penataan ruang. Pemerintah harus tegas dalam melarang pembangunan perumahan dan industri yang hendak menggunakan lahan di kawasan pertanian. Menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik dan bergensi secara alami juga dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Jika alih fungsi terus terjadi tanpa terkendali, hal itu tidak saja menimbulkan persoalan ketahanan pangan, tapi juga lingkungan dan ketenaga kerjaan. (Sumber : RB.wicaksono, “Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian dalam perkembangan kota nganjuk dan pengaruhnya terhadap perubahan mata pencaharian dan pendapatan petani”.)

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah dataran . Kondisi ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut dalam membangun sektor pertanian. Kecamatan Pallangga secara administratif terbagi atas 16 desa/kelurahan . Daerah ini terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 499,9 meter diatas permukaan laut. Dan sebagian besar penduduk kecamatan pallangga adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 39.369 jiwa, sedangkan untuk penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 37.747

jiwa tau 48,95% . Berdasarkan jumlah tersebut maka dapat diketahui rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu 95,88%. (Profil Kecamatan Pallangga Tahun, 2011).

Terlihat juga bahwa luas wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu 48,70 Ha. Adapun desa/ kelurahan yang terbesar memiliki luas wilayah terbesar yaitu Desa Bontoramba seluas 5,09 Ha atau sekitar 10,45% sedangkan desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Desa manggalli dengan luas 1,67 Ha atau sekitar 3,43%. Luas wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut merupakan salah satu modal utama dan faktor pendukung dalam pengembangan pembangunan dari wilayah tersebut. Wilayah yang luas serta didukung oleh kondisi tanah yang subur menjadi faktor penentu dalam peningkatan produksi sektor pertanian.

Keadaan lahan pertanian yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh dalam proses produksi . Hal ini disebabkan karena lahan merupakan salah satu faktor produksi. Hal ini disebabkan karena lahan merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian. Ketersediaan lahan yang luas serta didukung oleh kesuburan tanah menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, khususnya pada sektor pertanian. Kondisi wilayah yang ada dapat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan di suatu daerah. penggunaan lahan persawahan di daerah tersebut sebagian besar sawah teknis yaitu seluas 1.740,85 Ha atau sekitar 62,56 % sedangkan untuk sawah tadah hujan 1.041,79 Ha atau sekitar

37,44 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan tersebut dapat berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan. (Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten gowa, Tahun 2013).

Berangkat dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan, bagaimana adaptasi dan taraf hidup para masyarakat petani di tengah perubahan pemanfaatan lahan saat ini ? sehingga perlu adanya suatu masukan terhadap kinerja kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) pemerintah Kabupaten Gowa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul :

“Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok yakni :

1. Bagaimana dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengidentifikasi Bagaimana dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa?
2. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Menjadikan masukan yang bermanfaat dalam penyelenggaraan perubahan pemanfaatan lahan baik sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambilan keputusan bagi kebijaksanaan dan alternative penanganan permasalahan perkembangan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, maupun kepada pihak masyarakat.
 - b. Menjadi bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, adapun mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1. Ruang Lingkup Spasial (Wilayah)

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Dengan luas wilayah sekitar 48,70 Ha, yang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan meliputi Desa Je'netaallasa, Kelurahan Tetebatu, Desa Pallangga, Desa Bungaeja, Desa Pa'nakukang, Desa Julukanaya, Desa Julubori, Desa Julupamai, Desa Bontoramba, Desa Kampili, Desa Toddotoa, Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala, Kelurahan Mangalli, dan Desa Taeng.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini difokuskan pada dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, serta bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun. Khususnya penduduk yang berprofesi sebagai petani.

E. Batasan Penelitian

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian serta dengan adanya keterbatasan waktu pengerjaan maka perlu adanya batasan penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada Kecamatan Pallangga dan menjadi fokus utama adalah dampak perubahan dan upaya peningkatan perekonomian

masyarakat setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pembahasan ini membahas tentang pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang kajian teori yang menjadi landasan, antara lain yaitu Pengertian lahan, Definisi Perubahan Fungsi Lahan (konversi lahan), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan, Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non Pertanian, Penguasaan Lahan, Taraf Hidup dan Kesejahteraan Petani, Peraturan Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian, PEPRES RTR Kawasan Mamminasata, dan Rekapitulasi Kebijakan dan penetapan kedudukan terkait sektor pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, definisi operasional serta kerangka pikir penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Gowa, dan gambaran umum Kecamatan Pallangga yang meliputi kondisi fisik geografis dan luas wilayah, kondisi fisik alami seperti topografi, jenis tanah, penggunaan lahan. serta kajian perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non-pertanian dan faktor yang mempengaruhi serta pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat (petani). Dan dirangkakan juga tentang hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun seperti, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap perekonomian masyarakat, Kecamatan Pallangga.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan saran terhadap perubahan yang terjadi khususnya terhadap pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian lahan

Pengertian lahan (*land*) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, cair, dan bahkan benda gas. Pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat-sifat tersebut adalah berupa iklim, batuan dan struktur, bentuk lahan, dan proses, jenis tanah, tata air, dan vegetasi/tumbuhannya.

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain. (Haeruddin, 1997 : 6)

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan: tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan di atas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta

daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia. (Jayadinata 1999 : 10)

Lahan adalah sebagai ruang (*space*) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi, di mana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Menurut Jayadinata (1999) Pengertian lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga), misalnya dapat dikatakan: tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan diatas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia. Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam suatu hektar (ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain (Haeruddin dalam Yunita Handayani Amelia, 1999:6).

1. Konsep pola pemanfaatan lahan

Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan permukiman. Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam usaha untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan sesuatu daerah, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuka klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis. Istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Klasifikasi lahan didefinisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu di upayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu:

- a. Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi tanah;
- b. Terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan.

Penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut : penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari di mana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah pengawasan lahan. Proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian. (Soemarwoto 1994 : 212)

2. Klasifikasi pemanfaatan lahan

Informasi penggunaan lahan yang ditetapkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraris/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1997. Secara garis besar klasifikasi penggunaan lahan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu penggunaan lahan

perkotaan (*urban land use*) dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan urban meliputi perumahan, jasa (perkantoran, fasilitas umum), perdagangan, dan industri. Sedangkan penggunaan lahan non urban meliputi areal persawahan, kebun campuran, tegalan, tambak, hutan, semak belukar, alang-alang, dan padang rumput.

3. Faktor Pembentukan Pemanfaatan Lahan

Mengemukakan bahwa ruang kota sangat berkaitan dengan tiga sistem yaitu : sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan (alam). Ketiga sistem tersebut adalah :

- a. Sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dalam kelembagaannya mengatur unturnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang.
- b. Sistem pengembangan lahan berfokus pada proses pengubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem.
- c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibandingkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan serta proses-proses dasar yang berkaitan dengan air, udara dan materi.

Kegiatan sistem tersebut menjadi dasar penyusunan lahan dan terbentuknya pemanfaatan lahan, tetapi yang tidak terjadi factor esensial yaitu kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan,

keselamatan efisiensi, dan konservasi energi. Sedangkan menurut Jayadinata, faktor penentu dalam tata guna lahan adalah:

- a. Perilaku masyarakat. Tingkah laku dan tindak manusia dalam tata guna tanah disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia dalam kehidupan sosial maupun ekonomi, dalam kehidupan sosial misalnya, kemudahan; atau *convenience* sangat penting artinya; pengaturan lokasi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat rekreasi adalah untuk kemudahan.
- b. Kehidupan ekonomi, dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya adalah penting, maka diadakan pengaturan tempat sekolah supaya ekonomis, program rekreasi yang ekonomis yang berhubungan dengan pendapatan perkapita dan sebagainya.
- c. Kepentingan umum. Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna tanah yang meliputi: kesehatan, keamanan, moral, dan kesejahteraan umum (termasuk kemudahan, keindahan, dan kenikmatan) sebagainya.

Dalam kupasan tata guna lahan di mana suatu kota yang telah ada hubungan dengan pengertian itu, penggunaan tanah terdiri dari atas penggunaan bagian kelompok perumahan, industri, ruang terbuka, dan pendidikan, sehingga suatu kota dapat dianalisis.

B. Definisi Perubahan Fungsi Lahan (konversi lahan)

Utomo dkk. (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazim disebut dengan konversi lahan sebagai perubahan penggunaan atau fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin banyak jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Irawan (2004) mengungkapkan bahwa konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding permintaan komoditas non pertanian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju lebih tinggi dibanding permintaan komoditas pertanian. Konsekuensi lebih lanjut adalah, karena kebutuhan lahan untuk memproduksi setiap komoditas merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan, maka pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibanding kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Pengertian konversi atau alih fungsi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Konversi lahan pertanian ini tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Di negara-negara yang sedang berkembang konversi lahan tersebut umumnya dirangsang oleh transformasi struktur ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian ke sektor ekonomi yang lebih bersifat industrial. Proses transformasi ekonomi tersebut selanjutnya merangsang terjadinya migrasi penduduk ke daerah-daerah pusat kegiatan bisnis sehingga lahan pertanian yang lokasinya mendekati pusat kegiatan bisnis dikonversi untuk pembangunan kompleks perumahan. Secara umum pergeseran atau transformasi struktur ekonomi merupakan ciri dari suatu daerah atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka konversi lahan pertanian dapat dikatakan sebagai suatu fenomena pembangunan yang pasti terjadi selama proses pembangunan masih berlangsung. Begitu pula selama jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dan tekanan penduduk terhadap lahan terus meningkat maka konversi lahan pertanian sangat sulit dihindari (Kustiawan, 1997).

Sihaloho (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan adalah alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non pertanian atau dari lahan non pertanian ke lahan pertanian. Dari hasil penelitiannya yang dilakukan di Kelurahan Mulaharja, dia memaparkan bahwa konversi lahan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor pada arus makro yang meliputi pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk, intervensi

pemerintah dan ‘marginalisasi’ ekonomi atau kemiskinan ekonomi. (2) faktor pada asas mikro yang meliputi pola nafkah rumah tangga (struktur ekonomi rumahtangga), kesejahteraan rumahtangga (orientasi nilai ekonomi rumahtangga) dan strategi bertahan hidup rumahtangga (tindakan ekonomi rumahtangga).

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan

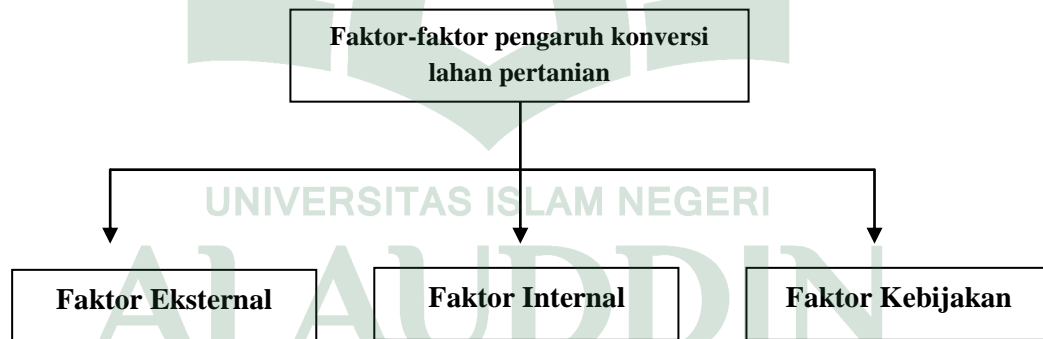
Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non-pertanian. Di tingkat wilayah, perubahan pemanfaatan lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah.

Pengaruh langsung dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung, seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan dipinggiran kota. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan,

pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah.

Menurut Situmeang (1998) dijelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi dimana telah terjadi peningkatan peranan sektor non-pertanian terhadap perekonomian dapat mempercepat perubahan pola penggunaan lahan ke arah pengkotaan. Selanjutnya, perubahan struktur perekonomian sendiri dapat dijelaskan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat terjadinya struktur ekonomi kearah sektor manufaktur, jasa dan sektor non-pertanian lainnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perubahan penggunaan lahan pertanian (sawah), yaitu (Kustiawan A, 1997);



Gambar 1. Bagan Faktor Pengaruh Konversi Lahan Pertanian

1. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi yang mendorong perubahan penggunaan lahan sawah ke penggunaan non-pertanian,

2. Faktor-faktor Internal adalah kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong lepasnya kepemilikan lahan,
3. Faktor Kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Faktor internal petani dalam penelitian ini diduga mencakup umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan anggota keluarga, luas lahan yang dimiliki, serta tingkat ketergantungan kepada lahan, sedangkan faktor eksternal meliputi jumlah tetangga yang mengkonversi lahan, pengaruh investor, serta faktor kebijakan pemerintah.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain (Isa I, 2004 : 4-6) :

1. Faktor kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya

dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (*sub urban area*). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non-pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat keberadaan “sawah kejeprit” yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.

3. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.

4. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
5. Degradasi lingkungan, antara lain kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya instrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang berpotensi meracuni tanaman padi.
6. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan, Sihaloho (2004) membagi konversi lahan ke dalam tujuh pola atau tipologi yaitu:

1. Konversi Gradual-Berpola Sporadis; pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama (lahan yang kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi).
2. Konversi Sistematis Berpola (enclave); pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk 'semparan lahan' secara serentak dalam waktu yang relatif sama.
3. Konversi Adaptasi Demografi (*Population growth driven land conversion*); pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal atau pemukiman akibat pertumbuhan penduduk.
4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (*Social Problem driven land conversion*); pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari masyarakat meninggalkan kondisi lama dan bahkan keluar dari sektor pertanian (utama).
5. Konversi Tanpa Beban; pola konversi yang dilakukan oleh pelaku (baik warga lokal) untuk melakukan aktivitas menjual lahan kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.
6. Konversi Adaptasi Agraris; pola konversi yang terjadi karena keinginan meningkatkan hasil pertanian dan juga minat untuk bertani di suatu tempat tertentu sehingga lahan dijual dan membeli lahan baru di tempat lain yang lebih bernilai produktif dan merupakan tempat yang 'dipandang tepat' untuk berusaha.

7. Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Pola; konversi yang diakibatkan oleh berbagai faktor khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, untuk perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak spesifik dijelaskan dalam konversi adaptasi demografi.

D. Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non–Pertanian

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian memiliki beberapa dampak dan pengaruh yang kuat bagi beberapa aspek. Dampak negatif akibat perubahan pemanfaatan lahan, antara lain (Widjanarko, 2006) :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga

meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005), bahwa dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.

Dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan adalah hilangnya peluang memproduksi hasil pertanian di lahan sawah yang terkonversi, yang besarnya berbanding lurus dengan luas lahannya. Jenis kerugian tersebut mencakup pertanian dan nilainya, pendapatan usaha tani, dan kesempatan kerja pada usaha tani. Selain itu juga hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja pada kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung dari kaitan ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*) dari kegiatan usaha tani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi (Sumaryanto, 2001).

Menurut Firman (2005) dijelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural *lanskap*, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak

langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan perubahan penggunaan lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Menurut Ruswandi (2007) dijelaskan bahwa secara faktual perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Menurut Furi (2007) dijelaskan bahwa konversi lahan atau perubahan penggunaan lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).

Dalam beberapa hal, hilangnya pertanian memang sempat menjadi perdebatan yang cukup seru antara mereka yang pro terhadap hilangnya pertanian terutama lahan subur, beririgasi tekbis. Mereka yang pro mempunyai argument bahwa dapat diatasi dengan kemajuan teknologi atau ketersediaan lahan untuk pengembangan lahan pertanian baru sebagai substitusi lahan yang hilang. Kemajuan teknologi di bidang rekayasa pertanian menghasilkan produk

yang lebih tinggi ,lebih bertahan terhadap hama ,sistem perakaran yang kuat dan waktu tumbuh yang singkat. Mereka yang kontramempunyai pandangan lain,khususnya terkait ketersediaan lahan pertanian subur ,produktif dan beririgasi teknis merupakan sumber daya yang sangat berharga. Hilangnya lahan pertanian yang terus menerus di semua WPU kota yang ada tanpa kendali di satu sisi dan makin bertambahnya kebutuhan perkotaan sebagai akibat pertambahan penduduk namun pasti pada suatu saat yang akan datang akan mengakibatkan kesenjangan antar produksi dan konsumsi yang semakin lebar.Kemampuan berswasembada akan semakin jauh dari harapan. Menurut (Dr.Hadi Sabar Yunus,M.A. ; 2008)

E. Penguasaan Lahan

Aspek penguasaan lahan seperti yang dikutip oleh Syahyuti (2005) tertuang dalam UUPA No. 5 tahun 1960. Secara konseptual, agraria terdiri atas dua aspek utama yang berbeda, yaitu aspek ‘penguasaan dan pemilikan’ dan aspek ‘penggunaan dan pemanfaatan’. Hal ini misalnya terlihat secara tegas dalam batasan tentang reforma agraria yang terdapat dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 Pasal 2, yang menyebutkan bahwa: *“Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria”*. Aspek ‘penguasaan dan pemilikan’ jelas berbeda dengan aspek ‘penggunaan dan pemanfaatan’, karena yang pertama berkenaan dengan bagaimana relasi hukum

manusia dengan lahan, sedangkan yang kedua membicarakan bagaimana lahan (dan sumberdaya agraria lain) digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya ekonomi.

Wiradi (1984) juga menjelaskan batasan pola-pola penguasaan lahan dengan menelaah istilah pemilikan, penguasaan, dan pengusahaan lahan. Kata 'pemilikan' merujuk kepada penguasaan formal, sedangkan 'penguasaan' menunjuk kepada penguasaan efektif, dalam artian mengusahakan lahan secara efektif. 'Pengusahaan' menunjuk kepada bagaimana caranya sebidang lahan diusahakan secara produktif.

Planck (1990) menyebutkan bahwa untuk menguasai lahan dapat dilakukan dengan sewa, gadai, bagi hasil, dan sebagainya. Pemilik lahan sempit dapat menggarap lahan orang lain melalui sewa atau sakap, di samping menggarap lahannya sendiri. Berdasarkan cara penguasaan tersebut, maka terdapat penggolongan penduduk pedesaan sebagai berikut:

1. Pemilik penggarap murni, yaitu petani yang menggarap lahannya sendiri.
2. Pemilik dan penyakap murni, yaitu mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki garapan melalui sewa atau bagi hasil. Golongan ini termasuk ke dalam kelompok tunakisma, tetapi jika dilihat dari garapan, maka mereka termasuk pengusaha lahan efektif.
3. Pemilik penyewa dan atau pemilik penyakap, yaitu mereka yang di samping menggarap lahannya sendiri, juga menggarap lahan milik orang lain.

4. Pemilik bukan penggarap, umumnya pemilik lahan luas.
5. Tunakisma mutlak, yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki lahan dan tidak mempunyai lahan garapan. Sebagian besar mereka adalah buruh tani

Terkait dengan pola hubungan agraria (lahan), Sihaloho (2004) menggolongkan penguasaan lahan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Masyarakat yang memiliki lahan luas dan menggarap lahannya kepada orang lain; pemilik lahan ini menerapkan sistem sewa ataupun bagi hasil. Bagi hasil yang umum disepakati.
2. Pemilik lahan sempit yang melakukan pekerjaan usahatani dengan tenaga kerja keluarga. Pola ini umumnya tidak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani karena seluruh kegiatan usahatani dilakukan sendiri sehubungan luas lahan yang dimiliki juga sempit.
3. Pemilik lahan yang melakukan usahatani sendiri tetapi banyak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani. Petani yang dimaksud di sini adalah petani berlahan sempit maupun berlahan luas.

Fenomena pemilikan lahan terkait erat dengan pertumbuhan penduduk. Makin mengecilnya persediaan lahan rata-rata per orang, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, mereka yang tak berlahan diperkirakan semakin bertambah (tunakisma). Dalam keadaan tekanan penduduk yang berat ini memberikan peluang bagi berkembangnya bentuk-bentuk hubungan penguasaan lahan yang kurang menguntungkan penggarap. Persaingan antara sesama buruh tani semakin sengit dalam mendapatkan kesempatan kerja (Rusli, 1995). Melihat

kondisi di atas, terkait dengan perencanaan penggunaan lahan, satu hal yang sering dilupakan adalah hak atas lahan. Pengaturan mengenai hak atas lahan tersebut merupakan jaminan bagi anggota masyarakat tentang penguasaannya atas sebidang lahan dan merupakan penghalang bagi anggota masyarakat yang satu untuk mengambil lahan orang lain tanpa persetujuan atau persyaratan yang bersangkutan.

F. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan (*welfare*) merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu.

Menurut Yosep seperti yang dikutip Maharani (2006), kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat diterapkan pada skala sosial besar dan kecil misalnya keluarga dan individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain.

Yosep (1996) dalam Furi (2007) mengemukakan dua pendekatan kesejahteraan, yakni:

1. Pendekatan makro, kesejahteraan dengan indikator-indikator yang telah disepakati secara alamiah, sehingga ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan data-data empiris suatu masyarakat.

2. Pendekatan mikro, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan psikologi individu secara pribadi untuk melihat apa yang dianggapnya sejahtera.

Menurut Sawidak (1985), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsumsi sendiri pada hakekatnya bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam beberapa hal konsumsi pun dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya bagi konsumennya.

Menetapkan kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas. Hal ini disebabkan permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut permasalahan perbidang saja, tetapi menyangkut berbagai bidang kehidupan yang sangat kompleks. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Mengingat data yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita per tahun adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama setahun untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Determinan utama dari kesejahteraan penduduk adalah daya beli,

apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup menurun sehingga tingkat kesejahteraan juga akan menurun.

Indikator kesejahteraan rakyat menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar propinsi dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan). Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Berbagai aspek mengenai indikator kesejahteraan dibahas oleh BPS (2006) antara lain:

1. Kependudukan

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Kesehatan dan Gizi

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan

indikator utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar. Dengan itu, dapat diasumsikan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai suatu masyarakat, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut semakin sejahtera.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Taraf dan Pola Konsumsi

Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut didistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran

akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

6. Perumahan dan Lingkungan

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga dan tempat penampungan kotoran akhir (jamban).

7. Sosial dan Budaya

Pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Pembahasan mengenai sosial budaya lebih difokuskan pada kegiatan sosial budaya yang mencerminkan aspek kesejahteraan, seperti melakukan perjalanan wisata dan akses pada informasi dan hiburan, yang mencakup menonton televisi, mendengarkan radio dan membaca surat kabar.

BPS (2008) kemudian memberikan gambaran tentang cara yang lebih baik untuk mengukur kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga mengingat sulitnya memperoleh data yang akurat. Cara yang dimaksud adalah dengan

menghitung pola konsumsi rumahtangga. Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumahtangga tersebut. Rumahtangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumahtangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumahtangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumahtangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

G. Peraturan Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Dalam UUD tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Landasan Hukum dan Kebijakan perubahan penggunaan lahan pertanian selain UUPA, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa RTRW mempertimbangkan budidaya tanaman pangan dimana perubahan fungsi ruang kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya memerlukan kajian dan penilaian atas perubahan fungsi ruang tersebut secara lintas sektor, lintas daerah, dan terpusat.

H. Perspektif Pertanian Dalam Islam

Ada tiga profesi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Dia berkata: “Pokok mata pencaharian tersebut adalah bercocok tanam (pertanian), perdagangan dan pembuatan suatu barang(industri)”. Para ulama berselisih tentang manakah yang paling baik dari ketiga profesi tersebut. Madzhab As-Syafi’i berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling baik. Sedangkan Imam Al-Mawardi dan Imam An-Nawawi berpendapat bercocok tanam lah yang paling baik karena beberapa alasan:

Pertama: Bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan sendiri. Dalam Shohih Al-Bukhori dari Miqdam bin Ma’dikariba rodhiyallohu’ anhu dari Nabi shallallohu ‘alaihiwasallam, Beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari orang yang memakan dari hasil usaha tangannya, dan adalah Nabi Dawud ‘alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri”.

Dan yang benar adalah apa yang di-nash-kan oleh Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam yaitu hasil tangannya sendiri. Maka bercocok tanam adalah profesi terbaik dan paling utama karena merupakan hasil pekerjaan tangan sendiri.

Kedua: Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum muslimin bahkan binatang. Karena secara adat manusia dan binatang haruslah

makan, dan makanan tersebut tidaklah diperoleh melainkan dari hasil tanaman dan tumbuhan.

Dan telah shohih dari Jabir rodhiyallohu ‘anhu dia berkata: telah bersabda Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ لَا يَرَزُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah seseorang merampas tanamannya melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah”. (HR Muslim).

Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan:

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia, binatang, dan burung melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah hingga hari kiamat”

Ketiga: bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. Ketika seseorang menanam tanaman maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji benih yang dia semaikan untuk tumbuh, dia juga tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan mengembangkan menjadi tanaman, tidak lah dia berkuasa membungakan dan membuahkan tanaman tersebut. Tumbuhnya biji, pertumbuhan tanaman,

munculnya bunga dan buah, pematangan hasil tanaman semua berada pada kekuasaan Alloh. Dari sinilah nampak nilai tawakkal dari seorang yang bercocok tanam. Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshori As-Syafii menambahkan: “Seutama-utama mata panchaharian adalah bercocok tanam karena lebih dekat dengan sikap tawakkal, bercocok tanam juga memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk, dan secara umum manusia butuh pada hasil pertanian. Berkata Az-Zarkasyi, bahwa semua orang memperhatikan makanan karena tidak ada yang tidak butuh kepada hasil bercocok tanam (makan) dan tidaklah kehidupan tegak tanpa adanya makanan.

Menurut sejarah Islam, setelah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, Baginda telah menggalakkan usaha pertanian agar ditingkatkan. Bumi Madinah ketika itu sememangnya subur perlu diusahakan dengan lebih giat. Dalam hubungan ini, kaum Muhajirin yang berhijrah bersama Baginda diaturnya supaya bekerjasama dengan kaum Ansar iaitu penduduk asal Madinah di dalam usaha-usaha pertanian. Hal seumpama ini sesuai dengan riwayat Rafi‘ bin Hadij bahawa di zaman Rasulullah telah diingatkan oleh beberapa orang bapa-bapa saudara Baginda iaitu Rasulullah melarang daripada perkara yang memberi manfaat kepada kami, lalu kami bertanya: Apakah perkara tersebut?:

Maksudnya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengerjakannya dengan bertani atau (jika dia tidak berupaya melakukannya) hendaklah menyerahkannya kepada saudaranya

supaya diusahakan dan janganlah dia menyewakannya (sekalipun) hanya sepertiga, seperempat dan makanan asasi.”(Hadis riwayat Abu Dawud)

Hakikat betapa Islam sangat menggalakkan sektor pertanian jelas daripada peruntukkan yang ada di dalam syariah. Sebagai contoh, sesiapa sahaja yang mengusahakan tanah terbiar dengan jayanya akan mendapat hak milik kekal terhadap tanah berkenaan berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Peruntukkan ini jelas memberi intensif kepada pengusaha-pengusaha bidang pertanian yang mengusahakan tanah terbiar atau mati. Perkara ini disebutkan dalam riwayat Aisyah Radhiallahu ‘anha, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa yang memakmurkan (mengusahakan) tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa maka dia lebih berhak terhadapnya”.

(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Walau bagaimanapun kita telah pun mempunyai peraturan atau undang-undang tanah, maka tidaklah boleh menggunakan tanah dengan sewenang-wenangnya melainkan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa.

I. Rekapitulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan MAMMINASATA pada Rencana Kawasan Budidaya

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah.

(2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
- b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
- c. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan irigasi teknis.

(3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. sebagian Kecamatan Bontonompo, sebagian Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian Kecamatan Barombong, sebagian Kecamatan Pallangga, sebagian Kecamatan Pattallassang, dan sebagian Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa; dan
- b. sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sanrabone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, dan sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar.

J. Rekapitulasi Kebijakan dan penetapan Terhadap kedudukan Kecamatan Pallangga, Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa.

1. Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;
- j. Pengembangan potensi pendidikan;
- k. Pengembangan potensi permukiman; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah

Sesuai dengan Perda nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 yang salah satu Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gowa dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan

kawasan budi daya. Pada pasal 31 dalam Perda No. 15/2012 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi :

- a. Kawasan lindung; dan
- b. Kawasan budidaya

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 46 yang terdiri dari :

- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukkan pertanian;
- c. kawasan peruntukkan perikanan;
- d. kawasan peruntukkan pertambangan;
- e. kawasan peruntukkan industri;
- f. kawasan peruntukkan pariwisata;
- g. kawasan peruntukkan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukkan lainnya.

Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 46 point b, dijabarkan dalam pasal 48 antara lain sebagai berikut :

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:

- (a). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- (b). Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- (c). Kawasan peruntukan perkebunan; dan
- (d). Kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

(a). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 33.201Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah **Kecamatan Pallangga**, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

(b). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah

Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah **Kecamatan Pallangga**, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a yang beririgasi teknis ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; . (Sumber :Kajian Hasil Inventrisasi LP2B kabupaten gowa/direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian Tahun 2014).

BAB III

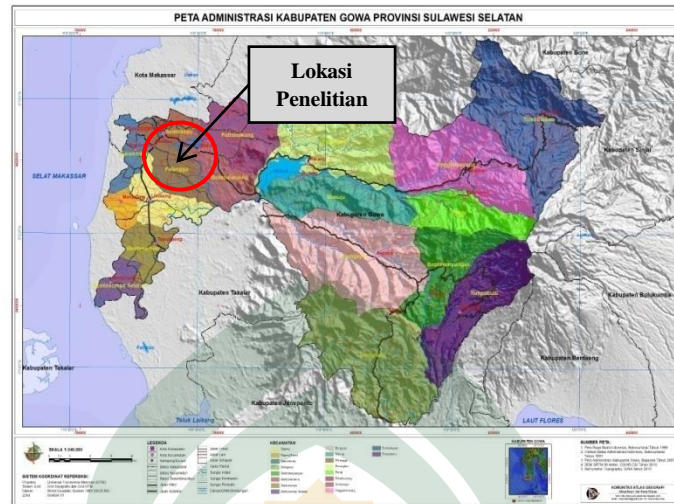
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu sifatnya deskriptif *kualitatif kuantitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan/fakta serta fenomena yang mengkaji tentang dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan pendekatan kuantitatif yaitu melalui perhitungan tabulatif, Penelitian *Kualitatif* merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara. Penelitian *Kuantitatif* merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul tentang, “**Analisis perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang berlokasi penelitian Pallangga, Kabupaten Gowa**”.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Gowa 2007

Alasan mengambil lokasi studi sebagai obyek penelitian yaitu karena di Kecamatan Pallangga telah terjadi banyak perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun yang menyebabkan penurunan hasil produktivitas pertanian dan banyaknya pekerja buruh tani serta petani penggarap yang ikut menurun perekonomiannya akibat dari alih fungsi lahan. sehingga perlu adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2017.

Tabel 1. Uraian Kegiatan Tugas Akhir Tahun 2017

No.	Uraian Kegiatan	Bulan									
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Pengajuan Judul										
2	Konsultasi Pembimbing										
3	Seminar Proposal										
4	Survey (Pengumpulan Data)										
5	Survey (Dokumentasi)										
6	Penyusunan Tugas Akhir										
7	Pembimbing										
8	Ujian Konfren										
9	Seminar Hasil										
10	Pembimbing/Perbaikan Ujian Hasil										
11	Seminar Akhir										
12	Pengumpulan Tugas Akhir										

C. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni :

“Dampak dan bagaimana upaya peningkatan setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data kuantitatif maupun data kualitatif yang dianggap relevan dengan penelitian.

Untuk itu dua jenis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif: Jenis data numerik atau berupa angka yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematik.
- b. Data Kualitatif: Jenis data yang berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis tetapi dengan kata-kata atau narasi. Data kualitatif tidak menggunakan model matematik, hanya terbatas pada teknik pengolahan data seperti membaca grafik, tabel, dan gambar, yang kemudian dilakukan penafsiran atau analisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung ke lapangan atau kawasan penelitian seperti kondisi eksisting dari penggunaan lahan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan 2010–2015. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum bidang Tata Ruang Kabupaten Gowa, Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, Dinas pertanian, Kantor Kecamatan Pallangga, Kantor Desa/kelurahan, dan dinas–dinas terkait lainnya. Data sekunder berupa data kebijakan perubahan pemanfaatan lahan, harga lahan, dan kependudukan, foto udara Kecamatan Pallangga, serta data–data lain yang dianggap mendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu :

1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi Visual

Kegiatan penting dalam observasi langsung ini adalah mengenai kondisi eksisting yang terkait dengan aspek kehidupan masyarakat terutama secara fisik sehingga dapat mengetahui karakteristik wilayah serta karakteristik penyebab terjadi alih fungsi lahan. Hasilnya berupa dokumentasi seperti foto maupun rekaman yang dapat digunakan untuk memperjelas deskripsi.

b. Kuisisioner

Untuk penelitian yang bersifat kuantitatif kuisisioner juga dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan data. Hasil dari kuisisioner nantinya akan dinarasikan secara deskriptif. Kuisisioner ini dilakukan untuk mengetahui

akibat yang ditimbulkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat alih fungsi lahan, perubahan kondisi ekonomi yang terjadi sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan.

c. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian dari instansi terkait yaitu dinas pertanian. Dalam metode dokumentasi digunakan kajian pustaka dan kajian peta, kajian pustaka digunakan untuk mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan kajian peta digunakan untuk mengkaji pengembangan fisik yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Survei Institusional

Survei institusional dilakukan dengan kunjungan untuk memperoleh data tertulis yang terdapat pada kantor/badan/instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Kantor Desa/kelurahan, Badan Pusat Statistik, Dinas pekerjaan umum bidang tata ruang, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya.

b. Studi Literatur

Survei literatur atau studi pustaka yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Kajian dapat dilakukan melalui buku–

buku wilayah periurban, perubahan guna lahan, makalah, maupun jurnal ilmiah.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Adapun yang menjadi populasi adalah jumlah penduduk yang bermata pencaharian atau berprofesi sebagai petani di Kecamatan Pallangga yang berjumlah **25.365 Jiwa**, yang bersumber dari profil Kecamatan tahun 2011. Responden yang diambil pada penelitian ini adalah petani yang memiliki lahan tetapi telah mengkonversikan lahannya yaitu dengan mengubah fungsinya untuk usaha di luar bidang pertanian baik seluruh lahan maupun sebagian, serta petani yang tidak mengkonversikan lahannya.

2. Sampel

Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi, yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri keberadaan populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel acak (*random sampling*). Dalam penarikan sampel, diupayakan sampel yang ditarik dapat merepresentasikan dari kondisi secara keseluruhan, walaupun jumlah sampel yang ditarik relative kecil

dibandingkan populasi. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel yang diambil

N = jumlah petani

d = derajat kebebasan (presisi)

Dalam hal ini jumlah populasi (n) sebanyak 25.365 jiwa, presisi derajat kebebasan ditetapkan 10% = 0,1 maka jumlah sampelnya yaitu :

$$n = \frac{25.365}{25.365 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{25.365}{254,65}$$

$$n = 99,60$$

$$n = 99,60$$

$$n = 100 \text{ responden (Jiwa)}$$

G. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berupa:

1. Perubahan pemanfaatan lahan pertanian dari waktu ke waktu (2010–2015)
2. Faktor dan pengaruh alih fungsi lahan :
 - a. Faktor internal : Umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan anggota keluarga, luas lahan yang dimiliki, serta tingkat ketergantungan kepada lahan
 - b. Faktor Eksternal : meliputi jumlah masyarakat petani yang mengkonversikan lahannya, dan pengaruh investor.
 - c. Faktor Kebijakan : RTR tahun 2012
1. Pengaruh Sosial Ekonomi :
 - a. Harga Lahan
 - b. Mata Pencaharian
 - c. Tingkat Pendapatan
 - d. Produktivitas Pertanian

H. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis masalah yakni :

1. **Bagaimana dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.**

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:

a. Analisis Korelasi

Analisis ini merupakan salah satu cara untuk mengkaji keterkaitan antara faktor yang berpengaruh antara koefisien korelasi (r). Dimana analisis ini digunakan untuk menentukan korelasi antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas dengan rumus berikut ini:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana pedoman interpretasi koefisien korelasi antar variabel yang diuji mengacu pada pedoman sebagai berikut:

Tabel 2. Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang Berpengaruh

No.	Tingkat Hubungan	Interval Koefisien
1	Sangat Kuat	0,800 – 1,000
2	Kuat	0,600 – 0,799
3	Sedang	0,400 – 0,599
4.	Rendah	0,200 -0,399
5.	Sangat Rendah	0,00 – 0,199

Sumber: Soegiyono 2005, 214

Keterangan :

r = Rata-rata korelasi

n = Jumlah variabel

Y = Jarak Lokasi penelitian

Σ = Total jumlah

Dengan Variabel yang digunakan yaitu :

X = Variabel bebas (Sosial Ekonomi Masyarakat) dengan variabel yang digunakan yaitu :

X_1 = Harga Lahan

X_2 = Mata Pencarian

X_3 = Tingkat Pendapatan

X_4 = Produktivitas Pertanian

2. Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat petani dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai rumusan masalah kedua, maka dikaji dengan menggunakan metode analisis **SWOT** (*Strength, Weakness, Oportunity dan Treaths*) yaitu salah satu metode analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh (*The Total Tourism System*), dimana penekanan bertumpu pada aspek **kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman**. Berikut ini penjelasan mengenai proses analisis SWOT:

- a. Faktor-faktor dari keempat variabel (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) ditentukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya

pengamatan/survei langsung dilapangan dan hasil wawancara dengan responden. Kemudian berikan nilai bobot untuk masing-masing variabel yang berjumlah total 100 (seratus). Pemberian bobot tersebut berdasarkan tingkat pengaruh (faktor strategis yang penting sampai tidak penting), sehingga besarnya rata-rata nilai bobot tergantung pada jumlah faktor strategis masing-masing aspek/variabel.

- b. Untuk mendapatkan nilai skor yang akan digunakan maka terlebih dahulu masing-masing faktor strategis diberikan ranking/nilai dengan pertimbangan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 3. Keterangan Ranking/Nilai untuk Variabel Positif
(Kekuatan dan Peluang) (Awaluddin 2010, 55)

Ranking/Nilai	Keterangan
1	Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki kelebihan yang lemah/tidak kuat dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.
2	Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki kelebihan yang kurang kuat dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.
3	Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki kelebihan yang kuat dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.
4	Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki kelebihan yang sangat kuat dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.

Tabel 4. Keterangan Ranking/Nilai untuk Variabel Negatif
(Kelemahan dan Ancaman) (Awaluddin 2010, 55)

Ranking/Nilai	Keterangan
1	Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada bersifat sangat lemah/kecil dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian..
2	Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada bersifat kurang kuat/lemah dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.
3	Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada bersifat kuat/akan berdampak besar dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.
4	Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada bersifat sangat kuat/akan berdampak sangat besar dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang mengembangkan sektor pertanian.

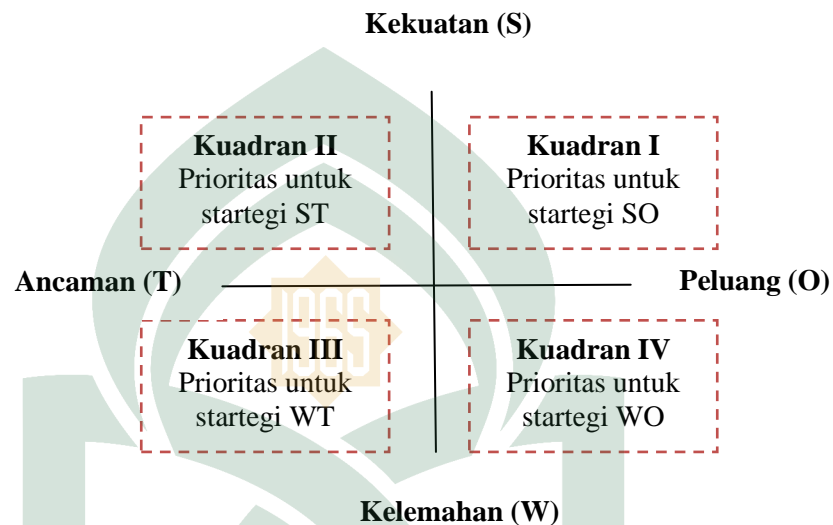
- c. Setelah didapatkan total skor untuk masing-masing variabel dari hasil pembobotan/perkalian antara bobot dan ranking, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus:

$$\text{IFAS} = S - T \text{ (untuk faktor internal)}$$

$$\text{EFAS} = O - T \text{ (untuk faktor eksternal)}$$

- d. Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan nilai yang akan dimasukkan kedalam diagram x & y (gambar 1) untuk mengetahui kuadran masing-masing faktor sehingga akan dihasilkan kesimpulan

bahwa strategi mana yang akan mendapatkan prioritas pelaksanaan untuk memaksimalkan pengembangan.



Gambar 3. Diagram Penentuan Strategi Prioritas Analisis SWOT
(Awaluddin 2010, 56)

- e. Alternatif strategi merupakan hasil matrik analisis SWOT yang menghasilkan berupa strategi SO, WO, ST, dan WT. alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 (empat) strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT, antara lain :
- 1) **Strategi SO**, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
 - 2) **Strategi ST**, strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

- 3) **Strategi WO**, diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- 4) **Strategi WT**, didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

I. Defenisi Operasional

1. Lahan disini lebih difokuskan pada lahan pertanian sebagai objek utama penelitian serta perubahannya dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah atau non pertanian.
2. Penggunaan lahan (*land use*) disini dapat dipahami sebagai suatu usaha pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berupa perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan bukan sawah dan bukan pertanian.
3. Lahan pertanian merupakan lahan sawah yang memproduksi padi selama 3 bulan sekali
4. Lahan Bukan Sawah adalah lahan yang tidak memproduksi padi minimal selama 3 bulan sekali
5. Lahan Bukan Pertanian adalah lahan yang pemanfaatannya bukan termasuk lahan pertanian

6. Konversi lahan adalah adanya penggunaan lahan di luar kegiatan pertanian baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini, baik konversi yang dilakukan sendiri oleh responden maupun lahan yang dijual responden untuk kepentingan non pertanian.
7. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebelum dan sesudah pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kaasan terbangun.
8. Umur adalah lamanya hidup responden yang diukur berdasarkan usia.
Pengukuran:
 - a. 30-40 tahun
 - b. 41-50 tahun
 - c. >50 tahun
9. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah dilakukan oleh responden.
Pengukuran:
 - a. tidak sekolah
 - b. tidak tamat SD/ sederajat
 - c. tamat SD/ sederajat
10. Jumlah tanggungan anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang masih menjadi tanggung jawab responden dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pengukuran:

- a. sedikit: ≤ 4 orang
- b. banyak: > 4 orang

11. Luas lahan yang dimiliki adalah ukuran lahan yang dimiliki oleh suatu rumah tangga responden dalam satuan hektar. Menurut sihaloho (2004)

Pengukuran:

- a. sempit: $< 0,25$ hektar
- b. sedang: $0,25-0,49$ hektar
- c. luas: $\geq 0,5$ hektar

12. Pengaruh tetangga adalah ada tidaknya tetangga yang mengkonversi lahan yang diukur dari banyaknya petani yang lahannya berada di sekitar responden yang telah mengalih fungsi lahannya.

Pengukuran:

- a. rendah: ≤ 5 orang
- b. tinggi: > 5 orang

13. Pengaruh investor adalah ada tidaknya orang yang berkepentingan untuk membangun usaha di bidang non pertanian yang mempengaruhi responden agar mengkonversi lahan.

Pengukuran:

- a. Ada pengaruh: investor menemui responden untuk negosiasi
- b. Tidak ada pengaruh: tidak ada investor yang menemui responden

14. Kebijakan pemerintah daerah adalah apakah konversi lahan dipengaruhi oleh perda penggunaan lahan di daerah itu.

Pengukuran:

- a. Dipengaruhi: responden terpengaruh oleh perda
 - b. Tidak dipengaruhi: responden tidak terpengaruh oleh perda
15. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani adalah ukuran sejahtera atau tidaknya sebuah rumah tangga petani yang diukur berdasarkan indikator kesejahteraan menurut masyarakat setempat. Dikatakan sejahtera apabila sebuah kepala rumah tangga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, bisa menyekolahkan anak, dan memiliki kendaraan bermotor.
16. Tingkat pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan rata-rata responden yang diperoleh selama satu bulan.

Pengukuran:

- a. Tinggi : > Rp. 2.000.000
 - b. Sedang : Rp 1.000.000-Rp 2.000.000
 - c. Rendah : < Rp 1.000.000
17. Mata pencaharian adalah sumber penghasilan utama rumah tangga petani selama 5 tahun terakhir.

Pengukuran:

- a. Petani
- b. Pedagang
- c. Buruh

d. Pegawai negeri/swasta

e. Pengusaha Industri Batubara

18. Pendidikan keluarga adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Pengukuran:

a. Rendah : SMP

b. Sedang : SMA

c. Tinggi : \geq SMA

19. Tingkat ketergantungan pada lahan adalah sejauh mana lahan dianggap penting dalam memenuhi kebutuhan responden yang diukur berdasarkan persentase pendapatan pertanian dari keseluruhan total pendapatan rumah tangga responden.

Pengukuran:

a. Rendah : $< 0,75$ persen pendapatan rumah tangga

b. Tinggi : $\geq 0,75$ persen pendapatan rumah tangga

20. Kesehatan adalah kondisi/ keadaan jasmani rumah tangga responden.

Pengukuran:

a. Tinggi : kondisi kesehatan baik, tidak banyak menderita penyakit.

b. Rendah : kondisi kesehatan buruk, banyak menderita penyakit.

21. Kepemilikan aset adalah jumlah barang berharga yang dimiliki rumah tangga petani

Pengukuran:

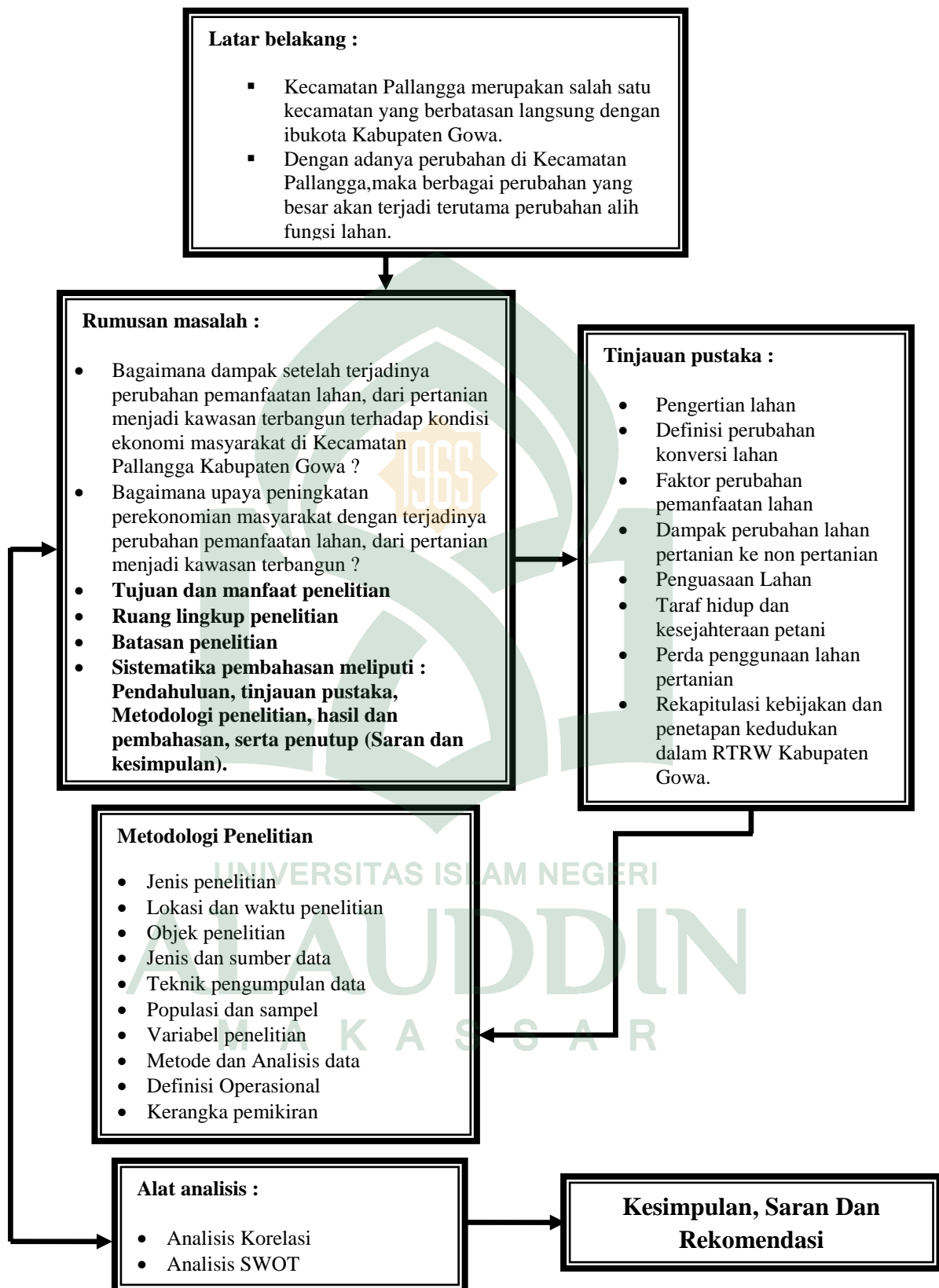
- a. Tinggi : memiliki rumah, tanah, kendaraan, dan lebih dari lima jenis barang elektronik.
 - b. Sedang : memiliki rumah, kendaraan, dan barang elektronik sejumlah lima
 - c. Rendah : memiliki rumah/sewa/kontrak dan memiliki kurang dari lima jenis barang elektronik.
22. Kondisi rumah (tempat tinggal) adalah keadaan fisik rumah yang ditempati oleh responden.
- Pengukuran:
- a. Layak : luas bangunan memadai dan fisik bangunan permanen
 - b. sedang : luas bangunan memadai dan fisik bangunan tidak permanen
 - c. Tidak layak : luas bangunan tidak memadai dan fisik rumah tidak permanen
23. Konsumsi adalah Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.
- Pengukuran :
- a. Rendah : persen makanan $>$ persen non makanan
 - b. Sedang : persen makanan = persen non makanan

c. Tinggi : persen makanan < persen non makanan

J. Kerangka Pembahasan

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 4. Kerangka Pembahasan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Gowa terletak pada 05° 34' 49" sampai 05° 04' 47" Lintang Selatan dan 119° 21' 12" sampai 120° 01' 26" Bujur Timur. Berdasarkan perhitungan dari data citra landsat, luas wilayah Kabupaten Gowa adalah sekitar 1.809,7 km² terdiri dari 18 Kecamatan (Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, Bontolempangan, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Pallangga, Parangloe, Parigi, Pattallassang, Sombaopu, Tinggimoncong, Tombolopao dan Tompobulu). Perhitungan dari data citra landsat, Kabupaten Gowa berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Gambar 5

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GOWA



B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pallangga

a. Kondisi Fisik Dasar

1.) Kondisi Geografis

Berdasarkan kondisi geografis di Kecamatan Pallangga merupakan daerah yang berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sombaopu,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bajeng,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu.

Dengan jumlah desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Pallangga adalah Mangalli dengan jarak sekitar 3 km dari Sungguminasa.

Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Pallangga

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Jenetallasa	3,22	9.	Bontoramba	6,09
2.	Tetebatu	2,51	10.	Kampili	5,35
3.	Pallangga	4,07	11.	Toddotoa	3,08
4.	Bungaejaya	3,02	12.	Parangbanoa	2,15
5.	Panakkukang	1,69	13.	Pangkabinanga	1,89
6.	Julukanaya	3,08	14.	Bontoala	1,25
7.	Julubori	4,37	15.	Mangalli	1,50
8.	Julupamai	2,70	16.	Taeng	2,27
					Jumlah 48,24 Km²

Sumber: Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2015

Gambar 6

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN PALLANGGA



2.) Kondisi Topografi

Secara topografi wilayah Kecamatan Pallangga merupakan wilayah pesisir pantai. Dengan tinggi tempat dari permukaan laut 10 mdpl, kemiringan lereng relatif datar datar yaitu 0-3 (5 m) % – 5-8 (5-10 m) %. Berdasarkan dari kondisi topografi yang dimiliki oleh Kecamatan Pallangga tersebut, dapat diketahuiawasannya memiliki daya dukung lahan yang cukup baik, karena kurangnya penghambat sehingga sangat sesuai untuk lahan terbangun. Hal inilah yang menyebabkan tingginya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga terjadi perubahan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman.

3.) Kondisi Geologi

Secara umum Kecamatan Pallangga memiliki jenis batuan sedimen dan vulkanik yang merupakan seri endapan gunung api tua terdiri dari batu tufa bubutia, halus sampai kasar, breksi aglomerat, lava dengan endapan sisipan batu pasir atau lempung. Selain itu memiliki penyebaran tanah regosol dan alluvial dimana jenis tanah ini berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, dan Ph bermacam-macam. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur, sehingga sangat sesuai untuk pengembangan lahan pertanian namun kondisi ini tidak menjadi penghambat tingginya perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Pallangga.

4.) Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang ada di Kecamatan Pallangga dapat dikelompokkan menjadi air tanah dan air permukaan. Air permukaan yang ada di Kecamatan Pallangga bersumber dari Sungai Jeneberang yang memiliki kecepatan arus sungai sebesar 0,3 m/s. Potensi sumber daya air yang besar di tunjang dengan kondisi tanah yang baik sebenarnya sangat sesuai untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian, namun disisi lain potensi sumber daya air juga menjadi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sehingga hal ini juga menjadi pemicu perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Pallangga.

Apabila ditinjau dari tingkat kerawanan banjir, maka di Kecamatan Pallangga tidak ada wilayah yang termasuk dalam kategori daerah banjir, sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan ini bebas dari hambatan dan pengaruh banjir. Namun yang menjadi masalah adalah semakin berkurangnya lahan pertanian dan daerah resapan air akibat pembangunan yang pesat dapat menjadi penyebab terjadinya banjir apabila curah hujan tinggi.

5.) Kondisi Klimatologi

Kecamatan Pallangga mempunyai Jumlah bulan hujan selama 6 bulan. Pada setiap tahunnya musim kemarau terjadi dari mulai bulan Juni-September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember-Maret.

Data Curah Hujan di Kecamatan Pallangga disesuaikan berdasarkan dengan data Curah hujan yang ada di Kabupaten Gowa (data makro) karena alasan bahwa Kecamatan Pallangga merupakan bagian wilayah Kabupaten Gowa maka data curah hujan Kabupaten Gowa dijadikan juga sebagai patokan untuk data curah hujan Kecamatan Pallangga. Kondisi curah hujan di Kabupaten Gowa oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Regional IV Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir mencatat rata-rata perubahan curah hujan dengan rata-rata curah hujan di kisaran 150-300 mm/tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pallangga memiliki curah hujan yang cukup merata di tiap tahunnya.

b. Penggunaan Lahan

Tata guna lahan atau penggunaan lahan yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan lahan serta pemeliharannya. Kecamatan Pallangga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa. Luas total wilayahnya mencapai 48,24 km². Penggunaan lahan kota juga akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan peningkatan berbagai aktifitas manusia. Penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga didominasi oleh pemukiman dan lahan persawahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Aspek Penggunaan Lahan di Kecamatan Pallangga

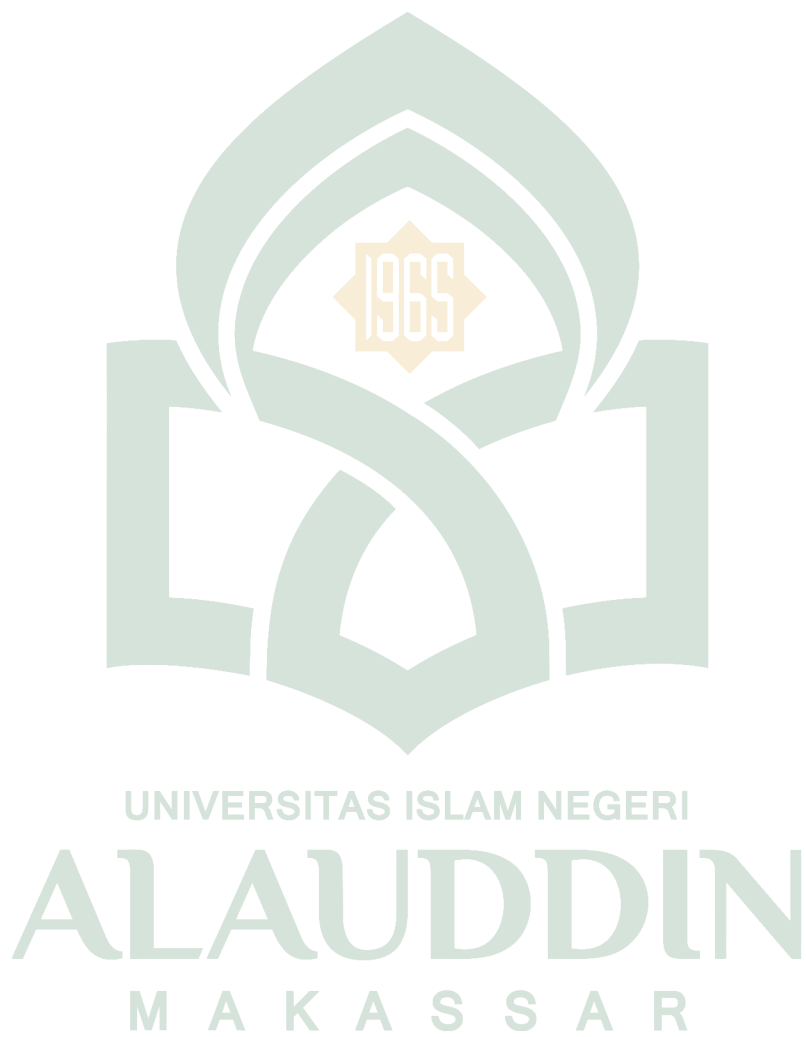
No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Lahan Pertanian (Sawah)	2024	41,95
2.	Lahan Kering (Ladang/Tegal dan Rawa)	688	27,46
3.	Pemukiman	1338	27,73
4.	Semak Belukar	23,8	0,49
5.	Pemukaman	0,2	0,004
6.	Lahan Kosong	9	0,18
7.	Lainnya	104	2,15
Jumlah		4824	100

Berdasarkan dari data penggunaan lahan tersebut diketahui penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga didominasi oleh lahan pertanian yaitu sawah dengan luas 2024 Ha atau 41,95% dari luas keseluruhan dan untuk lahan kering seperti ladang/tegal dan rawa 1325 Ha atau 27,46%. Dan penggunaan lahan pmukiman memiliki luas 1338 Ha, semak belukar dengan luas 23,8 Ha atau 0,14%, lahan kosong dengan luas sebesar 9 Ha atau 0,18% , pemakaman memiliki luas 0,2 Ha atau 0,004%, sedangkan penggunaan lahan lainnya memiliki luas 104 Ha atau 2,15% dari luas keseluruhan.

Gambar 7**PETA TOPOGRAFI**

Gambar 8**PETA HIDROLOGI**

Gambar 9**PETA GEOLOGI**

Gambar 10**PETA KLIMATOLOGI**

Gambar 11**PETA PENGGUNAAN LAHAN**

c. Aspek Kependudukan

1.) Jumlah dan Perkembangan Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kecamatan Pallangga hanya berjumlah 83.076 jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Pallangga mengalami peningkatan hingga 113.417 jiwa.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga dapat di lihat pada tabel 7 berikut.

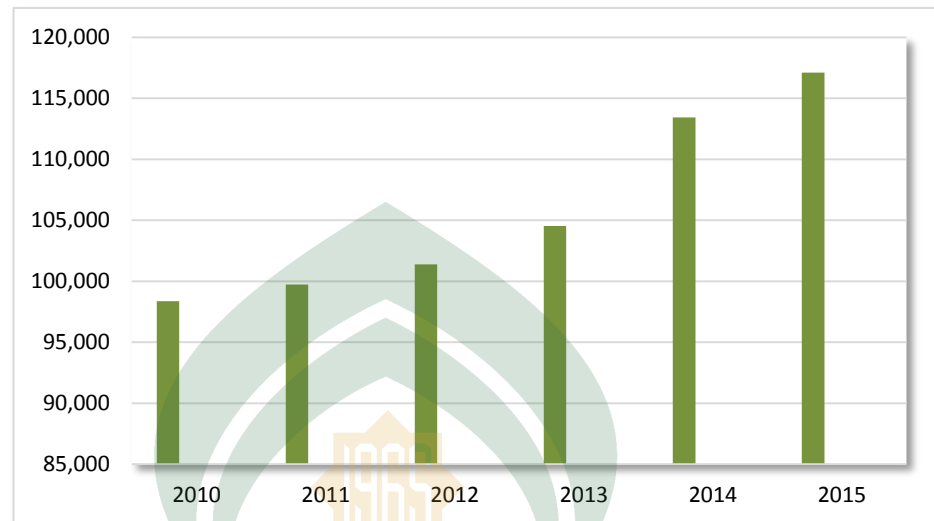
Tabel 7. Jumlah dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Kecamatan Pallangga 2010 – 2015

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan
1.	2010	98.372	-
2.	2011	99.715	1.343
3.	2012	101.371	1.655
4.	2013	104.523	3.152
5.	2014	113.417	8.894
6.	2015	117.115	3.698

Sumber :Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2016

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pallangga yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 jiwa, dengan pertambahan sampai 8.894 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut.

Grafik 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Kecamatan Pallangga 2010 – 2015



Berdasarkan pada grafik laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Pallangga, jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau dapat dikatakan jumlah penduduk Kecamatan Palangga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

2.) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pallangga pada tahun dari tahun 2008 - 2014 terdiri dari laki-laki sebanyak 7.138 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.485 jiwa, jadi total penduduk selama 5 tahun terakhir adalah 16.623 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk untuk jenis

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Secara rinci penduduk menurut jenis kelamin diuraikan pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Pallangga Tahun 2010 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
2010	48.546	49.826	98,372
2011	49.170	50.545	99.715
2012	50.027	51,344	101.371
2013	51.530	52.993	104.523
2014	55.997	57.420	113.417
2015	57.852	59.263	117.115

Sumber : Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2011 –2016

d. Aspek Sarana (Fasilitas)

1.) Fasilitas pemerintahan

Fasilitas pemerintahan atau kantor pemerintahan yang ada di Kecamatan Pallangga antara lain kantor camat, kantor lurah, sektor polisi, kantor polisi, dinas-dinas pemerintahan seperti, dinas pertanian, dinas PU, kantor peradilan negeri, dimana perkantoran tersebut melayani lingkup Kabupaten Maupun Kecamatan Pallangga.

2.) Fasilitas perdagangan

Fasilitas perdagangan merupakan tempat/wadah dalam rangka melaksanakan proses jual beli baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder penduduk. Adapun distribusi penyebaran fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Pallangga terdiri dari pasar yang

berada pada pusat kota pertokoan, kios dan warung yang terletak di seluruh wilayah kelurahan.

3.) Fasilitas peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kecamatan Pallangga yaitu Mesjid yang memiliki jumlah 54 unit kemudian langgar/ musolla 22 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Jumlah fasilitas peribadatan dirinci per kelurahan di Kecamatan Pallangga tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Mesjid	Surau/Mushollah	Gereja	Pura
1	Jenetallasa	13	-	-	-
2	Tetebatu	6	-	-	-
3	Pallangga	8	1	-	-
4	Bungaejaya	4	-	-	-
5	Panakkukang	7	1	-	-
6	Julukanaya	6	-	-	-
7	Julubori	7	-	-	-
8	Julupamai	6	-	-	-
9	Bontoramba	8	-	-	-
10	Kampili	9	-	2	1
11	Toddotoa	5	-	-	-
12	Parangbanoa	4	-	-	-
13	Pangkabinanga	5	-	-	-
14	Bontoala	19	-	-	-
15	Mangalli	8	1	-	-
16	Taeng	9	1	-	-
Jumlah		124	4	2	1

Sumber: Kec. Pallangga dalam angka 2015 dan Hasil Survey Lapangan 2016

4.) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Pallangga cukup memadai, diantaranya terdapat rumah sakit, puskesmas, rumah sakit bersalin, dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Jumlah fasilitas kesehatan dirinci per kelurahan di Kecamatan Pallangga tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
1	Jenetallasa	-	-	1	-	6
2	Tetebatu	-	-	1	-	4
3	Pallangga	-	-	1	-	6
4	Bungaejaya	-	-	1	1	4
5	Panakkukang	-	-	1	1	6
6	Julukanaya	-	-	1	-	4
7	Julubori	-	-	1	-	4
8	Julupamai	-	-	1	1	4
9	Bontoramba	-	-	1	-	6
10	Kampili	1	2	1	-	3
11	Toddotoa	-	-	1	1	3
12	Parangbanoa	-	-	1	1	3
13	Pangkabinanga	-	-	1	-	3
14	Bontoala	1	-	1	1	5
15	Mangalli	1	2	1	-	6
16	Taeng	-	-	1	-	4
Jumlah		3	4	16	6	71

Sumber: Kec. Pallangga dalam angka 2015 dan Hasil Survey Lapangan 2016

5.) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Pallangga terdiri dari TK, SD/ibtidayah, SMP/tsanawiyah, SMA/SMK/Aliyah, dan perguruan tinggi. Adapun jumlah fasilitas pendidikan SD/tsanawiyah lebih banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 30 unit SD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel 11 jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Pallangga berikut.

Tabel 11. Jumlah fasilitas pendidikan dirinci per kelurahan di Kecamatan Pallangga tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMK	Madrasah Ibtidayah	Madrasah Tsanawiah	Madrasah Aliyah
1	Jenetallasa	6	3	2	-	-	-	-
2	Tetebatu	3	1	-	-	-	-	-
3	Pallangga	1	2	-	-	1	1	1
4	Bungaejaya	1	1	-	-	-	-	-
5	Panakkukang	3	3	1	-	2	1	-
6	Julukanaya	3	2	-	-	1	1	-
7	Julubori	-	2	1	-	-	-	-
8	Julupamai	1	3	-	-	-	-	-
9	Bontoramba	1	3	1	-	-	1	-
10	Kampili	1	3	-	-	-	-	-
11	Toddotoa	2	2	-	-	-	-	-
12	Parangbanoa	2	2	-	-	-	-	-
13	Pangkabinanga	2	1	-	-	-	-	-
14	Bontoala	5	2	-	-	-	-	-
15	Mangalli	5	4	2	1	-	-	-
16	Taeng	3	4	-	-	-	-	-
Jumlah		39	38	7	1	4	4	1

Sumber :Kec. Pallangga dalam angka 2015 dan Hasil Survey Lapangan 2016

6.) Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kecamatan Pallangga saat ini kondisinya sudah baik, namun masih ada jaringan jalan yang kondisinya rusak yaitu jalan yang menghubungkan antar kecamatan ataupun ke desa atau kelurahan. Jadi, di Kecamatan Pallangga masih perlu adanya peningkatan jaringan jalan dan jalur transportasi untuk mendukung laju pertumbuhan wilayah/kota sehingga mendukung pertumbuhan ke wilayah sekitarnya.

7.) Jaringan Drainase

Prinsip dasar pembuangan/pengairan air hujan merupakan (permukaan) adalah bahwa air harus secepat mungkin dibuang dan secara terus menerus (Continue), serta dilakukan seekonomis mungkin. Dengan demikian, penyediaan saluran pembuangan merupakan usaha untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air pada suatu kawasan. Jaringan drainase yang ada di Kecamatan Pallangga menggunakan saluran drainase terbuka yang mengikuti ruas jalan yang ada. Kondisi jaringan drainase sudah baik tetapi masih ada beberapa jaringan drainase yang perlu diperbaiki guna mengantisipasi terjadinya air tersumbat ketika musim hujan.

8.) Jaringan Air Bersih

Prasarana dan sarana air bersih merupakan suatu kebutuhan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk dapat melayani kebutuhan penduduk akan air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia.

Pelayanan air bersih saat ini masih belum optimal dalam artian belum semua jaringan jalan yang ada terdapat saluran air bersih, demikian pula belum semua rumah tangga dapat memanfaatkan air bersih yang pelayanannya dilakukan oleh PDAM.

9.) Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer, karena dengan listrik penduduk dapat meningkatkan produktivitasnya, misalnya

dengan adanya penerangan lampu listrik penduduk dapat belajar di waktu malam hari, ronda/ siskamling malam hari termasuk perjalanan di malam hari, dengan adanya listrik penduduk juga dapat beraktivitas dengan baik dan dapat mengefisiensikan pekerjaan kantor dengan penggunaan komputernisasi dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik.

C. Aspek Sosial Ekonomi Kecamatan Pallangga

Aspek sosial ekonomi di Kecamatan Pallangga merupakan faktor dari perkembangan pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan Pallangga, adapun aspek sosial ekonomi tersebut terdiri dari harga lahan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan produktivitas pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Harga Lahan

Harga lahan pertanian yang disesuaikan dengan data BPN di Kecamatan Pallangga mengalami peningkatan setiap tahunnya dan penduduk yang memiliki lahan pertanian mereka cenderung untuk menjual tanah mereka. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya harga lahan dari Rp 75.000/meter dan akibat adanya konversi lahan pertanian kini berubah menjadi Rp 100.000 sampai >Rp 500.000/meter. Dan para pemilik lahan bisanya melakukan pengkavling-kavling. Dapat dilihat pada uraian tabel 12 berikut.

Tabel 12. Penilaian Responden Berdasarkan Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Harga Lahan		
		Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
1	Jenetallasa	1	3	6
2	Tetebatu	1	1	2
3	Pallangga	1	2	7
4	Bungaejaya	2	2	3
5	Panakkukang	1	2	2
6	Julukanaya	1	1	1
7	Julubori	1	2	2
8	Julupamai	1	1	2
9	Bontoramba	1	2	7
10	Kampili	3	2	4
11	Toddotoa	2	2	2
12	Parangbanoa	1	2	1
13	Pangkabinanga	1	1	3
14	Bontoala	2	2	3
15	Mangalli	1	2	3
16	Taeng	2	1	2
Jumlah		22	28	50

Sumber :Hasil Kuesioner Tahun 2016

b. Mata Pencarian

Mata pencarian yang ada di Kecamatan Pallangga pada umumnya adalah petani dan wiraswasta serta pegawai/PNS, sedangkan untuk petani yang menggarap lahan pertanian di Kecamatan Pallangga adalah pemilik lahan sendiri selain itu ada sebagian pemilik lahan yang menggunakan jasa petani penggarap. Berdasarkan hasil kuesioner dari 100 responden dominan masyarakat bermata pencarian wiraswasta dengan jumlah 52 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel 13 berikut.

Tabel 13. Penilaian Responden Berdasarkan Mata Pencaharian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Mata Pencaharian		
		Petani	PNS/pegawai	Wiraswasta
1	Jenetallasa	3	3	6
2	Tetebatu	1	1	3
3	Pallangga	-	5	7
4	Bungaejaya	2	1	2
5	Panakkukang	1	2	3
6	Julukanaya	2	-	2
7	Julubori	2	1	2
8	Julupamai	2	1	2
9	Bontoramba	3	2	3
10	Kampili	1	1	3
11	Toddotoa	2	-	2
12	Parangbanoa	1	-	2
13	Pangkabinanga	2	1	3
14	Bontoala	2	1	2
15	Mangalli	1	1	4
16	Taeng	2	1	3
Jumlah		27	21	52

Sumber :Hasil Kuesioner Tahun 2016

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan yang disesuaikan dengan standar pendapatan UMR pekerja di Kecamatan Pallangga tergantung dari apa jenis pekerjaan penduduknya seperti, PNS, Petani, wiraswasta dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survey melalui kuisisioner dari 100 orang responden diketahui bahwa pendapatan penduduk Rp2.250.000 sebanyak 72 orang responden, sedangkan pendapatan Rp2.000.000 sebanyak 14 orang responden, dan pendapatan Rp 1.800.000 sebanyak 14 orang responden. Dapat dilihat pada uraian tabel 14 berikut.

Tabel 14. Penilaian Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Pendapatan (Rp)		
		2.250.000	2.000.000	1.800.000
1.	Jenetallasa	7	1	2
2.	Tetebatu	4	-	1
3.	Pallangga	6	3	1
4.	Bungaejaya	4	1	1
5.	Panakkukang	5	1	1
6.	Julukanaya	4	-	1
7.	Julubori	4	-	2
8.	Julupamai	4	-	1
9.	Bontoramba	6	1	-
10.	Kampili	4	1	-
11.	Toddotoa	4	1	1
12.	Parangbanoa	3	1	1
13.	Pangkabinanga	5	1	1
14.	Bontoala	3	1	-
15.	Mangalli	4	1	-
16.	Taeng	5	1	1
Jumlah		72	14	14

Sumber : Hasil Kuesioner Tahun 2016

d. Produktivitas Pertanian

Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Palangga ditanami Padi. Pada tahun 2013 produksi padi sawah sebanyak 34.193 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2014 produksi padi sawah sebanyak 33.788 ton dan pada tahun 2015 produksi padi sawah mengalami penurunan kembali sebanyak 33.765 ton. Dapat dilihat pada uraian tabel 15. berikut.

Tabel 15. Produktivitas Pertanian Di Kecamatan Pallangga Tahun 2013-2015

No.	Jenis Tanaman	Produksi Pertanian (ton)		
		2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	34.193	33.788	33.765
2.	Kacang Hijau	1.420	1.057	1.562
3.	Ubi Kayu	339	78	480
4.	Ubi Jalar	324	100	376

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2016

Sedangkan berdasarkan hasil survey menggunakan kuisioner, untuk mengetahui pengaruh perubahan pemanfaatan lahan terhadap hasil produksi pertanian. Dapat dilihat pada uraian tabel 16 berikut.

Tabel 16. Penilaian Responden Berdasarkan Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Produktivitas Pertanian	
		Terjadi Penurunan (ya)	Tidak Terjadi Penurunan (tidak)
1.	Jenetallasa	4	2
2.	Tetebatu	3	2
3.	Pallangga	6	1
4.	Bungaejaya	4	3
5.	Panakkukang	4	2
6.	Julukanaya	4	2
7.	Julubori	4	3
8.	Julupamai	3	3
9.	Bontoramba	6	1
10.	Kampili	4	2
11.	Toddotoa	3	3
12.	Parangbanoa	5	1
13.	Pangkabinanga	4	3
14.	Bontoala	5	1
15.	Mangalli	4	2
16.	Taeng	3	3
Jumlah		66	34

Sumber : Hasil Kuesioner Tahun 2016

D. Analisis Pada Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian

Pada perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga akan dilihat pada hasil analisis perubahan pemanfaatan lahan dengan beberapa faktor yakni berdasarkan harga lahan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan produktivitas pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian tabel dan grafik pada analisis perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga berikut.



a. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Harga Lahan

Tabel 17. Penilaian Responden Pengaruh Faktor Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

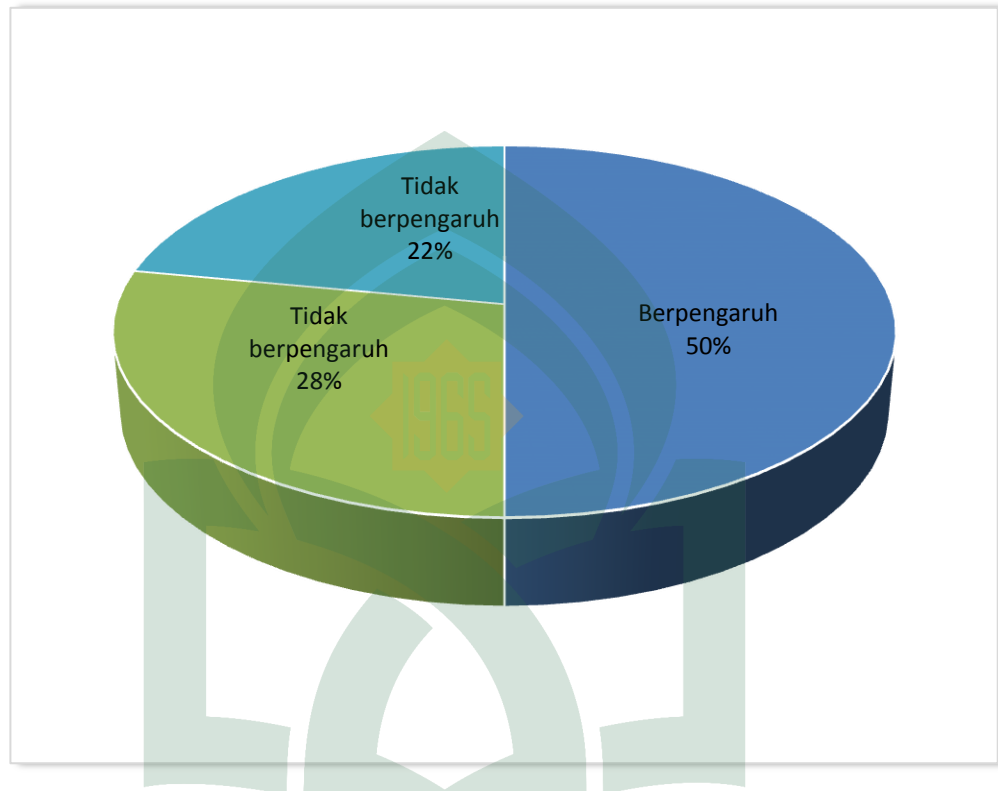
Penilaian responden	Identitas responden																																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Rp 200.000	1	10	1	10	1	10	2	20	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	3	30	2	20	1	10	1	10	2	20	1	10	2	20	22	22
Rp 500.000	3	30	1	10	2	20	2	20	2	20	1	10	2	20	1	10	2	20	2	20	2	20	2	20	1	10	2	20	2	20	1	10	28	28
Rp 1.000.000	6	60	2	20	7	70	3	30	2	20	1	10	2	20	2	20	7	70	4	40	2	20	1	10	3	30	3	30	3	30	2	20	50	50
Jumlah	10		4		10		7		5		3		5		4		10		9		6		4		5		7		6		5		100	100

Keterangan :

1 : Jenetallasa	6 : Julukanaya	11 : Toddotoa	16 : Taeng
2 : Tete batu	7 : Julubori	12 : Parangbanoa	
3 : Pallangga	8 : Julupamai	13 : Pangkabinanga	
4 : Bungaejaya	9 : Bontoramba	14 : Bontoala	
5 : Panakkukang	10 : Kampili	15 : Mangalli	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 22% responden menjawab harga lahan Rp 200.000, 28% menjawab Rp 500.000, dan 50% responden menjawab Rp 1.000.000. Dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap harga lahan di Kecamatan Pallangga.

Grafik 2. Pengaruh Faktor Harga Lahan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa menurut 50% responden menjawab harga lahan Rp 1.000.000, 28% responden menjawab Rp 500.000, 22% responden menjawab harga lahan Rp 200.000. Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap harga lahan di Kecamatan Pallangga.

b. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Mata Pencanharian

Tabel 18. Penilaian Responden Pengaruh Faktor Mata Pencanharian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

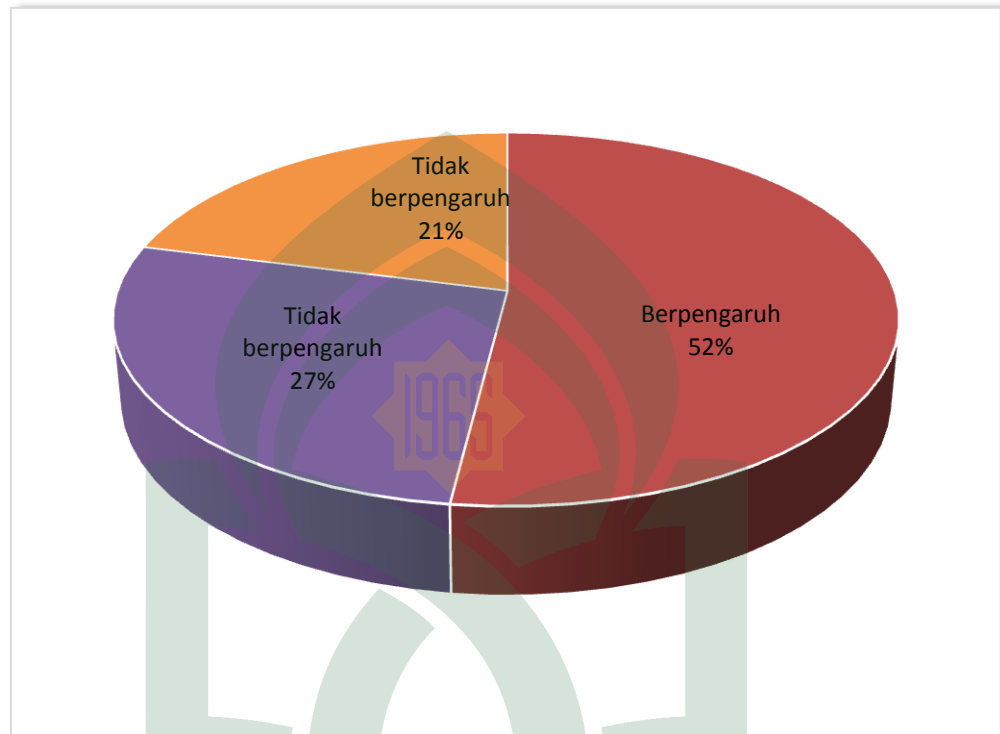
Penilaian responden	Identitas responden																																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Petani	3	30	1	10	-	-	2	20	1	10	2	20	2	20	2	20	3	30	1	10	2	20	1	10	2	20	2	20	1	10	2	20	27	27
PNS/pegawai	3	30	1	10	5	50	1	10	2	20	-	-	1	10	1	10	2	20	1	10	-	-	-	-	1	10	1	10	1	10	1	10	21	21
Wiraswasta	6	60	3	30	7	70	2	20	3	30	2	20	2	20	2	20	3	30	3	30	2	20	2	20	3	30	2	20	4	40	3	30	52	52
Jumlah	12		5		12		5		6		4		5		5		8		5		4		3		6		5		6		6		100	100

Keterangan :

1 : Jenetallasa	6 : Julukanaya	11 : Toddotoa	16 : Taeng
2 : Tete batu	7 : Julubori	12 : Parangbanoa	
3 : Pallangga	8 : Julupamai	13 : Pangkabinanga	
4 : Bungaejaya	9 : Bontoramba	14 : Bontoala	
5 : Panakkukang	10 : Kampili	15 : Mangalli	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 27% responden bermata pencaharian sebagai petani, 21% responden bermata pencaharian sebagai PNS/pegawai, dan 52% responden bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap mata pencaharian di Kecamatan Pallangga.

Grafik 3. Pengaruh Faktor Mata Pencaharian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa menurut 52% responden bermata pencaharian sebagai wiraswasta, 27% responden bermata pencaharian sebagai petani, 21% responden bermata pencaharian sebagai PNS/pegawai. Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap mata pencaharian di Kecamatan Pallangga.

c. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Tingkat Pendapatan

Tabel 19. Penilaian Responden Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

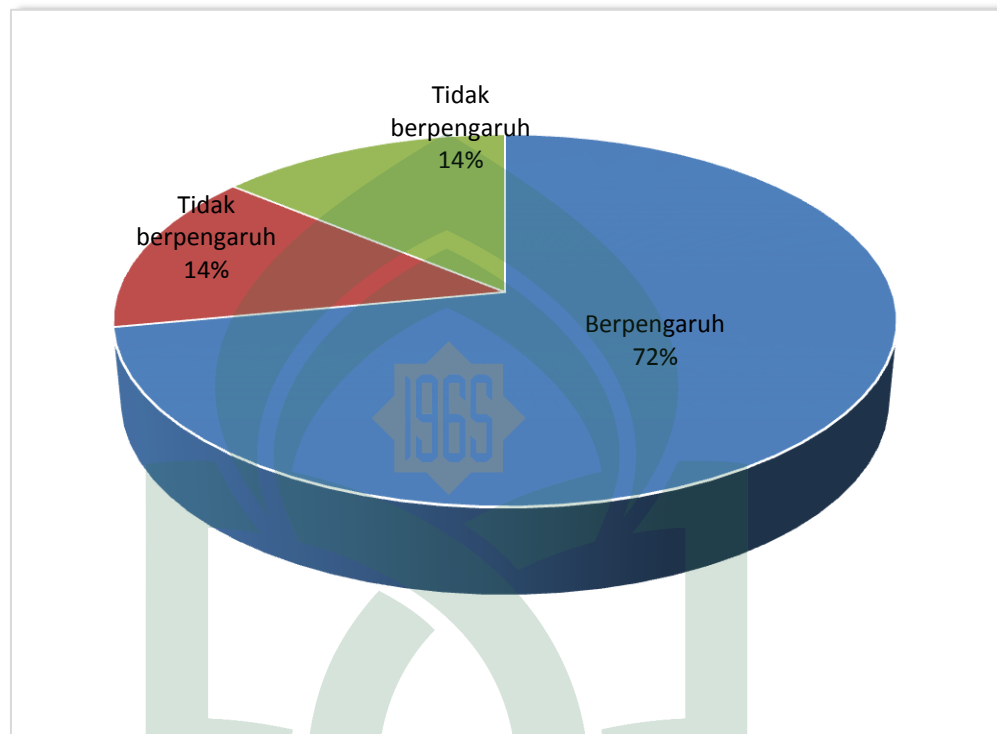
Penilaian responden	Identitas responden																																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
2.250.000	7	70	4	40	6	60	4	40	5	50	4	40	4	40	4	40	6	60	4	40	4	40	3	30	5	50	3	30	4	40	5	50	72	72
2.000.000	1	10	-	-	3	30	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	14	14
1.800.000	2	20	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	2	20	1	10	-	-	-	-	1	10	1	10	1	10	-	-	-	-	1	10	14	14
Jumlah	10		5		10		6		7		5		6		5		7		5		6		5		7		4		5		7		100	100

Keterangan :

1 : Jenetallasa	6 : Julukanaya	11 : Toddotoa	16 : Taeng
2 : Tete batu	7 : Julubori	12 : Parangbanoa	
3 : Pallangga	8 : Julupamai	13 : Pangkabinanga	
4 : Bungaejaya	9 : Bontoramba	14 : Bontoala	
5 : Panakkukang	10 : Kampili	15 : Mangalli	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 72% responden dengan tingkat pendapatan Rp2.250.000, 14% responden dengan tingkat pendapatan Rp2.000.000, dan 14% responden dengan tingkat pendapatan Rp1.800.000. Dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap tingkat pendapatan di Kecamatan Pallangga.

Grafik 4. Pengaruh Faktor Tingkat Pendapatan Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa menurut 72% responden dengan tingkat pendapatan Rp2.250.000, 14% responden dengan tingkat pendapatan Rp2.000.000, 14% responden dengan tingkat pendapatan Rp1.800.000. Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap tingkat pendapatan di Kecamatan Pallangga.

d. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Pada Produktivitas Pertanian

Tabel 20. Penilaian Responden Pengaruh Faktor Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016

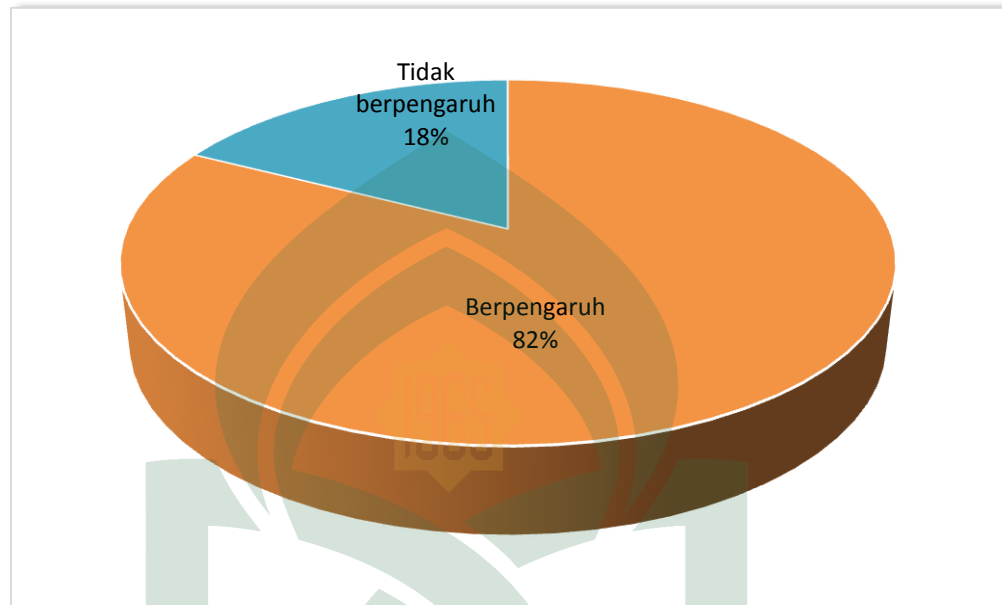
Penilaian responden	Identitas responden																																	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Terjadi penurunan (ya)	4	40	3	30	6	60	4	40	4	40	4	40	4	40	3	30	6	60	4	40	3	30	5	50	4	40	5	50	4	40	3	30	66	66
Tidak terjadi penurunan (tidak)	2	20	2	20	1	10	3	30	2	20	2	20	3	30	3	30	1	10	2	20	3	30	1	10	3	30	1	10	2	20	3	30	34	34
Jumlah	6		5		7		7		6		6		7		6		7		6		6		6		7		6		6		6		100	100

Keterangan :

1 : Jenetallasa	6 : Julukanaya	11 : Toddotoa	16 : Taeng
2 : Tete batu	7 : Julubori	12 : Parangbanoa	
3 : Pallangga	8 : Julupamai	13 : Pangkabinanga	
4 : Bungaejaya	9 : Bontoramba	14 : Bontoala	
5 : Panakkukang	10 : Kampili	15 : Mangalli	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 66% responden dengan menjawab terjadi penurunan (ya) dan 34% responden dengan menjawab tidak terjadi penurunan (tidak). Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Kecamatan Pallangga.

Grafik 5. Pengaruh Faktor Produktivitas Pertanian Terhadap Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Di Kecamatan Pallangga Tahun 2016



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa menurut 66% responden dengan menjawab terjadi penurunan (ya) dan 34% responden dengan menjawab tidak terjadi penurunan (tidak). Maka dapat diketahui bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Kecamatan Pallangga.

e. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga pada tahun 2016 yang terdiri atas perumahan dan pekarangan, fasilitas umum, perkantoran, perdagangan dan areal persawahan, jalan dan penggunaan lahan lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang paling dominan di Kecamatan Pallangga dari tahun 2011 hingga tahun 2016 yaitu lahan pertanian sebesar 605 ha (13,00 %). Areal lahan kering dan persawahan merupakan lahan yang terbesar yang berubah fungsi menjadi lahan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Perkembangan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Pallangga
Tahun 2011-2016

No	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun 2011		Tahun 2016		Perubahan Luas (ha)
		Luas (ha)	Persentase (%)	Luas (ha)	Persentase (%)	
1	Lahan pertanian (sawah)	2629	54,49	2024	41,95	-605
2	Lahan Kering (Ladang/Tegal dan rawa)	1346	27,90	1325	27,46	-21
3	Permukiman	704	14,59	1338	27,73	+638
4	Semak belukar	25,8	0,53	23,8	0,49	-2
5	Lahan kosong	15	0,31	9	0,18	-16
6	Pemukaman	0,2	0,004	0,2	0,004	0
7	Lainnya	104	2,15	104	2,15	0
Jumlah		4824	100	4824	100	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diatas, perkembangan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pallangga pada tahun 2011 masih didominasi oleh kegiatan lahan pertanian dan lahan kering dengan persentase

masing-masing 54,49% dan 27,90% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan, dimana penggunaan lahan pertanian dan lahan kering berubah menjadi 41,95% dan 27,46%. Sedangkan untuk lahan permukiman mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2006 sekitar 704 ha (14,59%) dan tahun 2010 sekitar 1338 ha (27,73%).

Untuk dapat mengontrol perubahan penggunaan lahan ini diperlukan adanya suatu pola penggunaan lahan yang diharapkan dapat menjadi pedoman penggunaan lahan. Adanya pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perubahan penggunaan lahan sehingga memberikan hasil yang optimal dan berdaya guna terhadap perubahan yang terjadi. Agar nantinya tidak terjadi kesemrawutan kota dalam artian pedoman tersebut berisikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang kemudian disepakati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang kemudian disepakati oleh masyarakat, sehingga apabila perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan pedoman rencana yang telah dibuat, dapat diberlakukan pemberian sanksi kepada yang melanggarnya. Peraturan dibuat dengan maksud masyarakat mengetahui bahwa perubahan yang tidak sesuai rencana akibatnya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan baru seperti kemacetan lalu lintas dan banjir.

f. Analisis Strategi Kebijakan Penggunaan Lahan

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh pemerintah dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Adapun pada perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga memiliki kekuatan pada harga lahan, mata pencaharian dan produktivitas pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

Tabel 22. Matiks SWOT

Internal Eksternal	Strenght (S) (Kekuatan)	Weaknesses (W) (Kelemahan)
	<ul style="list-style-type: none"> - Harga Lahan - Produktivitas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendapatan - Mata Pencaharian
Opportunies (O) (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan terhadap penggunaan lahan untuk permukiman - Peningkatan hasil produk pada pengembangan pertanian 	Meningkatkan produktivitas masyarakat pada penggunaan lahan dan hasil produk pertanian di Kecamatan Pallangga	Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan lahan seperti pembangunan permukiman sehingga mata pecaharian dan tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Pallangga semakin meningkat
Treaths (T) (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga produktivitas pertanian - Adanya perubahan pandangan berpikir masyarakat seiring perkembangan pembangunan permukiman 	Peningkatan partisipasi masyarakat menjaga pandangan terhadap produktivitas pertanian seiring pada perkembangan pembangunan. Dan peningkatan harga lahan karena perkembangan pembangunan permukiman yang semakin tinggi.	Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti menjaga kebersihan pada jaringan irigasi untuk hasil produk yang baik pada pertanian serta tetap menjaga perkembangan pembangunan permukiman sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan dan menghindari minimnya mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Pallangga.

Sumber : Hasil Penelitian 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah :
 - a) factor harga lahan
 - b) faktor mata pencaharian
 - c) faktor tingkat pendapatan
 - d) faktor produktifitas pertanian
2. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa mempengaruhi harga lahan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan produktivitas pertanian. Dari ke empat faktor tersebut maka faktor harga lahan, mata pencaharian, dan produktivitas pertanian menjadi faktor yang paling signifikan atau paling mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pallangga yang telah terjadi lebih dari lima tahun silam ini pada akhirnya memberikan perubahan pada ekonomi masyarakat khususnya petani. Usaha berdagang cukup menjanjikan namun demikian jumlah petani yang masih bertahan di Kecamatan Pallangga masih lebih banyak dari pada petani yang beralih profesi hal tersebut dikarenakan petani di Kecamatan

Pallangga ini banyak yang hanya bekerja pada lahan pertanian orang lain atau dapat dikatakan tidak memiliki lahan jika ingin dijual dan dijadikan sebagai modal usaha.

B. Saran

Melihat hasil pembahasan yang ada, penulisan ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan dari berbagai segi. Beberapa hal yang mungkin dapat menjadi rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan adalah :

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa
 - a. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan lahan untuk permukiman di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa agar tidak terjadi permukiman yang padat di salah satu lingkungan sehingga permukiman tiap lingkungan merata.
 - b. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil studi ini sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan lokasi lahan pengembangan permukiman di Kecamatan Pallangga.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji penentuan lokasi lahan pengembangan permukiman dengan berorientasi pada kondisi budaya masyarakat dan penelitian arah pengembangan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, 1999., **Pembangunan Perekonomian Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Ashari, 2003., **Daya Tarik Sektor Pertanian Yang Terus Menurun Menjadikan Petani Cenderung Melepas Kepemilikan Lahannya.**

Awaluddin 2010, 55., **Keterangan Ranking Kelemahan dan Ancaman Positif Negatif** Awaluddin 2010, 56., **Diagram Penentuan Strategi Prioritas Analisis SWOT.**

Badan Pusat statistik Kabupaten gowa, Tahun 2013)..., **Keadaan Lahan Pertanian Kecamatan Pallangga.**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2013., **Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Kecamatan Pallangga.**

Badan Pusat Statistik Tahun 2006, BPS 2008., **Indikator Kesejahteraan Rakyat Mengenai Taraf Hidup Rakyat Indonesia.**

Direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian Tahun 2014). **Kajian Hasil Inventrisasi LP2B kabupaten gowa.**

Haeruddin, 1997:6, Jayadinata 1999:10., **Pengertian Lahan.**

Isa I, 2004 : 4-6., **Faktor Pendorong Terjadinya Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian.**

Iqbal, 2007., **Penguasaan dan Penggunaan Lahan.**

Kustiawan, 1997., **Definisi Perubahan Lahan (Konversi Lahan).**

Maharani 2006, Yosep 1996, Furi 2007, Sawidak 1985., **Taraf Hidup dan Kesejahteraan Petani.**

PERDA Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032., **Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah.**

PEPRES Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 70 Ayat (2)., **Rencana Kawasan Budidaya.**

Profil Kecamatan Pallangga, Tahun 2011., **Kondisi Aspek Fisik Wilayah.**

(Q.S Surah Al-Isra: 17/84)., **Mengisyarakan Bahwa Seluruh Perubahan Yang Terjadi Dimuka Bumi Ini Disebabkan Oleh Ulah Manusia.**

RB.wicaksono,. “Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian dalam perkembangan kota nganjuk dan pengaruhnya terhadap perubahan mata pencaharian dan pendapatan petani”).

Soemarwoto 1994:212., **Konsep Pola Pemanfaatan Lahan.**

Sumaryanto, 2001, Widjanarko, 2006, Firman 2005, Ruswandi 2007, Furi 2007,

Soegiyono 2005,214., **Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang Berpengaruh.**

Syahyuti 2005, Wirardi 1984, Planck 1990, Sihaloho 2004, Rusli,1995., **Penguasaan Lahan.**

UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)., **Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian.**

Yunus, M.A ; 2008., **Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non–Pertanian.**

Pertanian Dalam Perspektif Islam.

<http://bemjagribisnisuin.blogspot.com/03/pertanian-dalam-perspektif-islam.html>.

Pukul 09.24 Wita.

Pertanian Menurut Islam.

<http://www.aspirasindp.com/arkib/PertanianmenurutIslam.html>. Pukul 17.55 Wita.

Q.S. At- Taubah Ayat 105 http://www.allonblog.com/2015/09/bacaan-artinya-hukum-bacaan-beserta_16.html. Pukul 19.00 Wib